MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 60/Permentan/SR.310/12/2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
20. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 582/Kpts/OT.050/9/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;

33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 14 September 2015;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2014 oleh AKN IV BPK RI Nomor 11a/ LHP/ XVII/ 05/2015 tanggal 29 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.
4. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang ditetapkan berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
8. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
9. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
10. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
11. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
12. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
15. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
16. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:

a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Gubernur dan/atau Kepala Dinas Provinsi serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2015.

Pasal 6

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

(3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

Pasal 7

(1) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menetapkan alokasi per kabupaten/kota dan/atau kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

(2) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. realokasi antar provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
    b. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
    c. realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.

(3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c.

(4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:

a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.

(4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.

(6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

(7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 13

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

(2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 16

(1) KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
(3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran II. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015
Tanggal : 3 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	74.400	21.770	10.680	49.230	18.010
2	SUMATERA UTARA	171.150	48.330	53.270	142.830	41.690
3	SUMATERA BARAT	71.110	26.300	18.820	61.730	20.120
4	J A M B I	30.480	17.700	6.880	44.210	7.850
5	R I A U	30.760	12.010	8.550	49.750	8.240
6	BENGKULU	16.620	8.330	4.700	20.480	6.810
7	SUMATERA SELATAN	173.600	43.600	7.890	112.290	23.610
8	BANGKA BELITUNG	17.960	3.930	1.970	20.250	5.060
9	LAMPUNG	265.670	46.560	21.350	160.080	36.410
10	KEP. RIAU	90	25	20	270	30
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-
12	BANTEN	60.060	21.040	1.470	27.890	7.010
13	JAWA BARAT	571.940	154.000	71.300	336.080	56.750
14	D.I. YOGYAKARTA	41.290	3.670	9.750	24.250	12.890
15	JAWA TENGAH	818.470	158.650	213.315	420.340	246.050
16	JAWA TIMUR	1.058.940	165.280	500.270	611.870	378.560
17	B A L I	42.710	2.300	7.030	24.560	24.040
18	KALIMANTAN BARAT	34.460	13.220	4.200	91.710	25.030
19	KALIMANTAN TENGAH	15.860	4.530	1.520	33.840	3.790
20	KALIMANTAN SELATAN	38.500	8.120	1.860	38.690	7.100
21	KALIMANTAN TIMUR	18.100	5.370	2.650	32.280	2.130
22	KALIMANTAN UTARA	2.180	300	90	3.000	500
23	SULAWESI UTARA	19.090	4.230	510	3.090	2.360
24	GORONTALO	19.600	1.400	510	18.570	790
25	SULAWESI TENGAH	32.600	3.850	9.450	31.340	5.600
26	SULAWESI TENGGARA	19.620	7.240	4.110	15.890	7.610
27	SULAWESI SELATAN	267.470	39.180	63.280	115.220	29.890
28	SULAWESI BARAT	23.510	2.110	6.610	19.930	1.570
29	NUSA TENGGARA BARAT	129.750	18.330	14.410	10.130	12.080
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23.650	5.570	2.440	16.910	4.740
31	MALUKU	2.750	180	210	3.480	740
32	PAPUA	6.210	2.570	610	6.910	2.550
33	MALUKU UTARA	240	25	95	330	100
34	PAPUA BARAT	1.160	280	180	2.570	290
JUMLAH		4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran III. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015
Tanggal : 3 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4.100.000	416.501	316.033	328.310	340.116	352.144	312.681	206.639	325.753	178.747	312.189	421.789	589.098
SP-36	850.000	123.850	69.522	86.877	91.433	79.021	59.727	36.560	66.856	31.490	63.076	68.750	72.838
ZA	1.050.000	125.359	81.883	96.358	86.956	83.062	85.446	49.883	98.988	46.931	89.218	98.407	107.509
NPK	2.550.000	280.568	204.949	251.347	251.775	236.036	204.213	127.796	208.087	124.558	203.981	231.191	225.499
ORGANIK	1.000.000	82.600	65.847	107.695	103.432	92.743	79.163	47.658	83.180	44.366	95.531-	103.257	94.528
JUMLAH PUPUK	9.550.000	1.028.878	738.233	870.587	873.713	843.006	741.230	468.536	782.864	426.091	763.995	923.395	1.089.472

Jenis Pupuk : UREA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	3.335.350	338.824	257.093	267.080	276.684	286.469	254.366	168.101	265.000	145.411	253.965	343.126	479.231
Hortikultura	198.440	20.159	15.296	15.890	16.462	17.044	15.134	10.001	15.766	8.651	15.110	20.415	28.512
Perkebunan	465.760	47.315	35.901	37.296	38.637	40.003	35.521	23.474	37.006	20.306	35.465	47.915	66.921
Peternakan	37.720	3.832	2.908	3.020	3.129	3.240	2.877	1.901	2.997	1.644	2.872	3.880	5.420
Perikanan Budidaya	62.730	6.372	4.835	5.023	5.204	5.388	4.784	3.162	4.984	2.735	4.776	6.453	9.014
JUMLAH	4.100.000	416.502	316.033	328.309	340.116	352.144	312.682	206.639	325.753	178.747	312.188	421.789	589.098

Jenis Pupuk : SP-36

(Ton

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	635.375	92.578	51.967	64.940	68.346	59.068	44.646	27.329	49.975	23.539	47.150	51.391	54.44
Hortikultura	51.000	7.431	4.171	5.213	5.486	4.741	3.584	2.194	4.011	1.889	3.785	4.125	4.37
Perkebunan	142.715	20.794	11.673	14.587	15.352	13.268	10.028	6.138	11.225	5.287	10.590	11.543	12.23
Peternakan	5.100	744	417	521	549	474	358	219	401	189	378	413	43
Perikanan Budidaya	15.810	2.303	1.293	1.616	1.701	1.470	1.111	680	1.244	586	1.173	1.279	1.35
JUMLAH	850.000	123.850	69.521	86.877	91.434	79.021	59.727	36.560	66.856	31.490	63.076	68.751	72.83

Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015
Tanggal : 3 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	74.400	7.558	5.735	5.958	6.172	6.390	5.674	3.750	5.911	3.244	5.665	7.654	10.690
2	SUMATERA UTARA	171.150	17.386	13.192	13.705	14.198	14.700	13.053	8.626	13.598	7.462	13.032	17.607	24.591
3	SUMATERA BARAT	71.110	7.224	5.481	5.694	5.899	6.108	5.423	3.584	5.650	3.100	5.415	7.315	10.217
4	J A M B I	30.480	3.096	2.349	2.441	2.528	2.618	2.325	1.536	2.422	1.329	2.321	3.136	4.379
5	R I A U	30.760	3.125	2.371	2.463	2.552	2.642	2.346	1.550	2.444	1.341	2.342	3.164	4.420
6	BENGKULU	16.620	1.688	1.281	1.331	1.379	1.427	1.268	838	1.320	725	1.266	1.710	2.388
7	SUMATERA SELATAN	173.600	17.635	13.381	13.901	14.401	14.910	13.239	8.749	13.793	7.568	13.219	17.859	24.943
8	BANGKA BELITUNG	17.960	1.824	1.384	1.438	1.490	1.543	1.370	905	1.427	783	1.368	1.848	2.581
9	LAMPUNG	265.670	26.988	20.478	21.274	22.039	22.818	20.261	13.390	21.108	11.582	20.229	27.331	38.172
10	KEP. RIAU	90	9	7	7	7	8	7	5	7	4	7	9	13
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	60.060	6.101	4.629	4.809	4.982	5.158	4.580	3.027	4.772	2.618	4.573	6.179	8.630
13	JAWA BARAT	571.940	58.101	44.086	45.798	47.445	49.123	43.618	28.826	45.442	24.935	43.550	58.839	82.178
14	D.I. YOGYAKARTA	41.290	4.194	3.183	3.306	3.425	3.546	3.149	2.081	3.281	1.800	3.144	4.248	5.933
15	JAWA TENGAH	818.470	83.145	63.089	65.540	67.896	70.297	62.419	41.251	65.029	35.683	62.321	84.200	117.600
16	JAWA TIMUR	1.058.940	107.573	81.624	84.795	87.845	90.951	80.759	53.370	84.135	46.166	80.631	108.939	152.151
17	B A L I	42.710	4.339	3.292	3.420	3.543	3.668	3.257	2.153	3.393	1.862	3.252	4.394	6.137
18	KALIMANTAN BARAT	34.460	3.501	2.656	2.759	2.859	2.960	2.628	1.737	2.738	1.502	2.624	3.545	4.951
19	KALIMANTAN TENGAH	15.860	1.611	1.223	1.270	1.316	1.362	1.210	799	1.260	691	1.208	1.632	2.279
20	KALIMANTAN SELATAN	38.500	3.911	2.968	3.083	3.194	3.307	2.936	1.940	3.059	1.678	2.932	3.961	5.532
21	KALIMANTAN TIMUR	18.100	1.839	1.395	1.449	1.501	1.555	1.380	912	1.438	789	1.378	1.862	2.601
22	KALIMANTAN UTARA	2.180	221	168	175	181	187	166	110	173	95	166	224	313
23	SULAWESI UTARA	19.090	1.939	1.471	1.529	1.584	1.640	1.456	962	1.517	832	1.454	1.964	2.743
24	GORONTALO	19.600	1.991	1.511	1.569	1.626	1.683	1.495	988	1.557	854	1.492	2.016	2.816
25	SULAWESI TENGAH	32.600	3.312	2.513	2.610	2.704	2.800	2.486	1.643	2.590	1.421	2.482	3.354	4.684
26	SULAWESI TENGGARA	19.620	1.993	1.512	1.571	1.628	1.685	1.496	989	1.559	855	1.494	2.018	2.819
27	SULAWESI SELATAN	267.470	27.171	20.617	21.418	22.188	22.973	20.398	13.480	21.251	11.661	20.366	27.516	38.431
28	SULAWESI BARAT	23.510	2.388	1.812	1.883	1.950	2.019	1.793	1.185	1.868	1.025	1.790	2.419	3.378
29	NUSA TENGGARA BARAT	129.750	13.181	10.001	10.390	10.763	11.144	9.895	6.539	10.309	5.657	9.880	13.348	18.643
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23.650	2.403	1.823	1.894	1.962	2.031	1.804	1.192	1.879	1.031	1.801	2.433	3.398
31	MALUKU	2.750	279	212	220	228	236	210	139	218	120	209	283	395
32	PAPUA	6.210	631	479	497	515	533	474	313	493	271	473	639	892
33	MALUKU UTARA	240	24	18	19	20	21	18	12	19	10	18	25	34
34	PAPUA BARAT	1.160	118	89	93	96	100	88	58	92	51	88	119	167
	JUMLAH PROPINSI	4.100.000	416.501	316.033	328.310	340.116	352.144	312.681	206.639	325.753	178.747	312.189	421.789	589.098

Lampiran 3.2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

No.	Propinsi	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	60.524	6.148	4.665	4.847	5.021	5.198	4.616	3.050	4.809	2.639	4.609	6.226	8.696
2	SUMATERA UTARA	139.231	14.144	10.732	11.149	11.550	11.958	10.618	7.017	11.062	6.070	10.602	14.323	20.005
3	SUMATERA BARAT	57.848	5.877	4.459	4.632	4.799	4.968	4.412	2.916	4.596	2.522	4.405	5.951	8.312
4	J A M B I	24.795	2.519	1.911	1.986	2.057	2.130	1.891	1.250	1.970	1.081	1.888	2.551	3.563
5	R I A U	25.023	2.542	1.929	2.004	2.076	2.149	1.908	1.261	1.988	1.091	1.905	2.574	3.595
6	BENGKULU	13.520	1.373	1.042	1.083	1.122	1.161	1.031	681	1.074	589	1.029	1.391	1.943
7	SUMATERA SELATAN	141.224	14.346	10.886	11.309	11.715	12.130	10.770	7.118	11.220	6.157	10.753	14.528	20.291
8	BANGKA BELITUNG	14.610	1.484	1.126	1.170	1.212	1.255	1.114	736	1.161	637	1.112	1.503	2.099
9	LAMPUNG	216.123	21.955	16.659	17.306	17.928	18.562	16.482	10.893	17.171	9.422	16.456	22.234	31.053
10	KEP. RIAU	73	7,4	5,6	5,9	6,1	6,3	5,6	3,7	5,8	3,2	5,6	7,5	10,5
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	48.859	4.963	3.766	3.912	4.053	4.196	3.726	2.462	3.882	2.130	3.720	5.026	7.020
13	JAWA BARAT	465.273	47.265	35.864	37.257	38.597	39.962	35.483	23.450	36.967	20.284	35.428	47.865	66.852
14	D.I. YOGYAKARTA	33.589	3.412	2.589	2.690	2.786	2.885	2.562	1.693	2.669	1.464	2.558	3.456	4.826
15	JAWA TENGAH	665.825	67.638	51.323	53.316	55.234	57.187	50.778	33.557	52.901	29.028	50.698	68.497	95.667
16	JAWA TIMUR	861.448	87.511	66.401	68.981	71.462	73.989	65.697	43.417	68.444	37.556	65.594	88.622	123.775
17	B A L I	34.745	3.530	2.678	2.782	2.882	2.984	2.650	1.751	2.761	1.515	2.646	3.574	4.992
18	KALIMANTAN BARAT	28.033	2.848	2.161	2.245	2.325	2.408	2.138	1.413	2.227	1.222	2.135	2.884	4.028
19	KALIMANTAN TENGAH	12.902	1.311	995	1.033	1.070	1.108	984	650	1.025	562	982	1.327	1.854
20	KALIMANTAN SELATAN	31.320	3.182	2.414	2.508	2.598	2.690	2.389	1.579	2.488	1.365	2.385	3.222	4.500
21	KALIMANTAN TIMUR	14.724	1.496	1.135	1.179	1.221	1.265	1.123	742	1.170	642	1.121	1.515	2.116
22	KALIMANTAN UTARA	1.773	180	137	142	147	152	135	89	141	77	135	182	255
23	SULAWESI UTARA	15.530	1.578	1.197	1.244	1.288	1.334	1.184	783	1.234	677	1.182	1.598	2.231
24	GORONTALO	15.945	1.620	1.229	1.277	1.323	1.369	1.216	804	1.267	695	1.214	1.640	2.291
25	SULAWESI TENGAH	26.520	2.694	2.044	2.124	2.200	2.278	2.023	1.337	2.107	1.156	2.019	2.728	3.810
26	SULAWESI TENGGARA	15.961	1.621	1.230	1.278	1.324	1.371	1.217	804	1.268	696	1.215	1.642	2.293
27	SULAWESI SELATAN	217.587	22.104	16.772	17.423	18.050	18.688	16.594	10.966	17.288	9.486	16.568	22.384	31.263
28	SULAWESI BARAT	19.125	1.943	1.474	1.531	1.587	1.643	1.459	964	1.520	834	1.456	1.968	2.748
29	NUSA TENGGARA BARAT	105.552	10.723	8.136	8.452	8.756	9.066	8.050	5.320	8.386	4.602	8.037	10.859	15.166
30	NUSA TENGGARA TIMUR	19.239	1.954	1.483	1.541	1.596	1.652	1.467	970	1.529	839	1.465	1.979	2.764
31	MALUKU	2.237	227	172	179	186	192	171	113	178	98	170	230	321
32	PAPUA	5.052	513	389	405	419	434	385	255	401	220	385	520	726
33	MALUKU UTARA	195	20	15	16	16	17	15	10	16	9	15	20	28
34	PAPUA BARAT	944	96	73	76	78	81	72	48	75	41	72	97	136
JUMLAH PROPINSI		3.335.350	338.824	257.093	267.080	276.684	286.469	254.366	168.101	265.000	145.411	253.965	343.126	479.231

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015
Tanggal : 3 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3.335.350	635.375	812.385	2.018.580	817.200
Hortikultura	198.440	51.000	49.350	122.655	88.400
Perkebunan	465.760	142.715	174.930	383.775	83.600
Peternakan	37.720	5.100	11.865	18.360	2.300
Perikanan Budidaya	62.730	15.810	1.470	6.630	8.500
JUMLAH	4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran 3.3. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	3.601	366	278	288	299	309	275	181	286	157	274	370	517
2	SUMATERA UTARA	8.284	842	639	663	687	711	632	417	658	361	631	852	1.190
3	SUMATERA BARAT	3.442	350	265	276	286	296	262	173	273	150	262	354	495
4	J A M B I	1.475	150	114	118	122	127	113	74	117	64	112	152	212
5	R I A U	1.489	151	115	119	124	128	114	75	118	65	113	153	214
6	BENGKULU	804	82	62	64	67	69	61	41	64	35	61	83	116
7	SUMATERA SELATAN	8.402	854	648	673	697	722	641	423	668	366	640	864	1.207
8	BANGKA BELITUNG	869	88	67	70	72	75	66	44	69	38	66	89	125
9	LAMPUNG	12.858	1.306	991	1.030	1.067	1.104	981	648	1.022	561	979	1.323	1.848
10	KEP. RIAU	4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	2.907	295	224	233	241	250	222	147	231	127	221	299	418
13	JAWA BARAT	27.682	2.812	2.134	2.217	2.296	2.378	2.111	1.395	2.199	1.207	2.108	2.848	3.977
14	D.I. YOGYAKARTA	1.998	203	154	160	166	172	152	101	159	87	152	206	287
15	JAWA TENGAH	39.614	4.024	3.053	3.172	3.286	3.402	3.021	1.997	3.147	1.727	3.016	4.075	5.692
16	JAWA TIMUR	51.253	5.207	3.951	4.104	4.252	4.402	3.909	2.583	4.072	2.234	3.903	5.273	7.364
17	B A L I	2.067	210	159	166	171	178	158	104	164	90	157	213	297
18	KALIMANTAN BARAT	1.668	169	129	134	138	143	127	84	133	73	127	172	240
19	KALIMANTAN TENGAH	768	78	59	61	64	66	59	39	61	33	58	79	110
20	KALIMANTAN SELATAN	1.863	189	144	149	155	160	142	94	148	81	142	192	268
21	KALIMANTAN TIMUR	876	89	68	70	73	75	67	44	70	38	67	90	126
22	KALIMANTAN UTARA	106	11	8	8	9	9	8	5	8	5	8	11	15
23	SULAWESI UTARA	924	94	71	74	77	79	70	47	73	40	70	95	133
24	GORONTALO	949	96	73	76	79	81	72	48	75	41	72	98	136
25	SULAWESI TENGAH	1.578	160	122	126	131	136	120	80	125	69	120	162	227
26	SULAWESI TENGGARA	950	96	73	76	79	82	72	48	75	41	72	98	136
27	SULAWESI SELATAN	12.946	1.315	998	1.037	1.074	1.112	987	652	1.029	564	986	1.332	1.860
28	SULAWESI BARAT	1.138	116	88	91	94	98	87	57	90	50	87	117	163
29	NUSA TENGGARA BARAT	6.280	638	484	503	521	539	479	317	499	274	478	646	902
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1.145	116	88	92	95	98	87	58	91	50	87	118	164
31	MALUKU	133	14	10	11	11	11	10	7	11	6	10	14	19
32	PAPUA	301	31	23	24	25	26	23	15	24	13	23	31	43
33	MALUKU UTARA	12	1,2	0,9	0,9	1	1	0,9	0,6	0,9	0,5	0,9	1,2	1,7
34	PAPUA BARAT	56	5,7	4,3	4,5	4,7	4,8	4,3	2,8	4,5	2	4,3	6	8
	JUMLAH PROPINSI	198.440	20.159	15.296	15.890	16.462	17.044	15.134	10.001	15.766	8.651	15.110	20.415	28.512

Lampiran 3.4. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	8.452	859	651	677	701	726	645	426	672	368	644	869	1.214
2	SUMATERA UTARA	19.443	1.975	1.499	1.557	1.613	1.670	1.483	980	1.545	848	1.480	2.000	2.794
3	SUMATERA BARAT	8.078	821	623	647	670	694	616	407	642	352	615	831	1.161
4	J A M B I	3.463	352	267	277	287	297	264	175	275	151	264	356	498
5	R I A U	3.494	355	269	280	290	300	266	176	278	152	266	359	502
6	BENGKULU	1.888	192	146	151	157	162	144	95	150	82	144	194	271
7	SUMATERA SELATAN	19.721	2.003	1.520	1.579	1.636	1.694	1.504	994	1.567	860	1.502	2.029	2.834
8	BANGKA BELITUNG	2.040	207	157	163	169	175	156	103	162	89	155	210	293
9	LAMPUNG	30.180	3.066	2.326	2.417	2.504	2.592	2.302	1.521	2.398	1.316	2.298	3.105	4.336
10	KEP. RIAU	10	1,0	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,8	0,4	0,8	1,1	1,5
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	6.823	693	526	546	566	586	520	344	542	297	520	702	980
13	JAWA BARAT	64.972	6.600	5.008	5.203	5.390	5.580	4.955	3.275	5.162	2.833	4.947	6.684	9.335
14	D.I. YOGYAKARTA	4.691	476	362	376	389	403	358	236	373	204	357	483	674
15	JAWA TENGAH	92.978	9.445	7.167	7.445	7.713	7.986	7.091	4.686	7.387	4.054	7.080	9.565	13.359
16	JAWA TIMUR	120.296	12.220	9.273	9.633	9.979	10.332	9.174	6.063	9.558	5.245	9.160	12.375	17.284
17	B A L I	4.852	493	374	389	402	417	370	245	385	212	369	499	697
18	KALIMANTAN BARAT	3.915	398	302	313	325	336	299	197	311	171	298	403	562
19	KALIMANTAN TENGAH	1.802	183	139	144	149	155	137	91	143	79	137	185	259
20	KALIMANTAN SELATAN	4.374	444	337	350	363	376	334	220	347	191	333	450	628
21	KALIMANTAN TIMUR	2.056	209	158	165	171	177	157	104	163	90	157	212	295
22	KALIMANTAN UTARA	248	25	19	20	21	21	19	12	20	11	19	25	36
23	SULAWESI UTARA	2.169	220	167	174	180	186	165	109	172	95	165	223	312
24	GORONTALO	2.227	226	172	178	185	191	170	112	177	97	170	229	320
25	SULAWESI TENGAH	3.703	376	285	297	307	318	282	187	294	161	282	381	532
26	SULAWESI TENGGARA	2.229	226	172	178	185	191	170	112	177	97	170	229	320
27	SULAWESI SELATAN	30.385	3.087	2.342	2.433	2.521	2.610	2.317	1.531	2.414	1.325	2.314	3.126	4.366
28	SULAWESI BARAT	2.671	271	206	214	222	229	204	135	212	116	203	275	384
29	NUSA TENGGARA BARAT	14.740	1.497	1.136	1.180	1.223	1.266	1.124	743	1.171	643	1.122	1.516	2.118
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.687	273	207	215	223	231	205	135	213	117	205	276	386
31	MALUKU	312	32	24	25	26	27	24	16	25	14	24	32	45
32	PAPUA	705	72	54	56	59	61	54	36	56	31	54	73	101
33	MALUKU UTARA	27	3	2,1	2	2,3	2,3	2,1	1	2,2	1	2	3	4
34	PAPUA BARAT	132	13	10	11	11	11	10	7	10	6	10	14	19
	JUMLAH PROPINSI	465.760	47.315	35.901	37.296	38.637	40.003	35.521	23.474	37.006	20.306	35.465	47.915	66.921

Lampiran 3.5. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	684	70	53	55	57	59	52	34	54	30	52	70	98
2	SUMATERA UTARA	1.575	160	121	126	131	135	120	79	125	69	120	162	226
3	SUMATERA BARAT	654	66	50	52	54	56	50	33	52	29	50	67	94
4	J A M B I	280	28	22	22	23	24	21	14	22	12	21	29	40
5	R I A U	283	29	22	23	23	24	22	14	22	12	22	29	41
6	BENGKULU	153	16	12	12	13	13	12	8	12	7	12	16	22
7	SUMATERA SELATAN	1.597	162	123	128	132	137	122	80	127	70	122	164	229
8	BANGKA BELITUNG	165	17	13	13	14	14	13	8	13	7	13	17	24
9	LAMPUNG	2.444	248	188	196	203	210	186	123	194	107	186	251	351
10	KEP. RIAU	0,8	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,04	0,07	0,04	0,06	0,09	0,1
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	553	56	43	44	46	47	42	28	44	24	42	57	79
13	JAWA BARAT	5.262	535	406	421	436	452	401	265	418	229	401	541	756
14	D.I. YOGYAKARTA	380	39	29	30	32	33	29	19	30	17	29	39	55
15	JAWA TENGAH	7.530	765	580	603	625	647	574	380	598	328	573	775	1.082
16	JAWA TIMUR	9.742	990	751	780	808	837	743	491	774	425	742	1.002	1.400
17	B A L I	393	40	30	31	33	34	30	20	31	17	30	40	56
18	KALIMANTAN BARAT	317	32	24	25	26	27	24	16	25	14	24	33	46
19	KALIMANTAN TENGAH	146	15	11	12	12	13	11	7	12	6	11	15	21
20	KALIMANTAN SELATAN	354	36	27	28	29	30	27	18	28	15	27	36	51
21	KALIMANTAN TIMUR	167	17	13	13	14	14	13	8	13	7	13	17	24
22	KALIMANTAN UTARA	20	2	1,5	1,6	1,7	1,7	1,5	1	1,6	0,9	1,5	2,1	2,9
23	SULAWESI UTARA	176	18	14	14	15	15	13	9	14	8	13	18	25
24	GORONTALO	180	18	14	14	15	15	14	9	14	8	14	19	26
25	SULAWESI TENGAH	300	30	23	24	25	26	23	15	24	13	23	31	43
26	SULAWESI TENGGARA	181	18	14	14	15	16	14	9	14	8	14	19	26
27	SULAWESI SELATAN	2.461	250	190	197	204	211	188	124	196	107	187	253	354
28	SULAWESI BARAT	216	22	17	17	18	19	16	11	17	9	16	22	31
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.194	121	92	96	99	103	91	60	95	52	91	123	172
30	NUSA TENGGARA TIMUR	218	22	17	17	18	19	17	11	17	9	17	22	31
31	MALUKU	25	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4
32	PAPUA	57	6	4	5	5	5	4	3	5	2	4	6	8
33	MALUKU UTARA	2,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
34	PAPUA BARAT	11	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	1,1	1,5
	JUMLAH PROPINSI	37.720	3.832	2.908	3.020	3.129	3.240	2.877	1.901	2.997	1.644	2.872	3.880	5.420

Lampiran 3.6. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.138	116	88	91	94	98	87	57	90	50	87	117	164
2	SUMATERA UTARA	2.619	266	202	210	217	225	200	132	208	114	199	269	376
3	SUMATERA BARAT	1.088	111	84	87	90	93	83	55	86	47	83	112	156
4	J A M B I	466	47	36	37	39	40	36	24	37	20	36	48	67
5	R I A U	471	48	36	38	39	40	36	24	37	21	36	48	68
6	BENGKULU	254	26	20	20	21	22	19	13	20	11	19	26	37
7	SUMATERA SELATAN	2.656	270	205	213	220	228	203	134	211	116	202	273	382
8	BANGKA BELITUNG	275	28	21	22	23	24	21	14	22	12	21	28	39
9	LAMPUNG	4.065	413	313	325	337	349	310	205	323	177	310	418	584
10	KEP. RIAU	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,06	0,1	0,1	0,2
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	919	93	71	74	76	79	70	46	73	40	70	95	132
13	JAWA BARAT	8.751	889	675	701	726	752	667	441	695	382	666	900	1.257
14	D.I. YOGYAKARTA	632	64	49	51	52	54	48	32	50	28	48	65	91
15	JAWA TENGAH	12.523	1.272	965	1.003	1.039	1.076	955	631	995	546	954	1.288	1.799
16	JAWA TIMUR	16.202	1.646	1.249	1.297	1.344	1.392	1.236	817	1.287	706	1.234	1.667	2.328
17	B A L I	653	66	50	52	54	56	50	33	52	28	50	67	94
18	KALIMANTAN BARAT	527	54	41	42	44	45	40	27	42	23	40	54	76
19	KALIMANTAN TENGAH	243	25	19	19	20	21	19	12	19	11	18	25	35
20	KALIMANTAN SELATAN	589	60	45	47	49	51	45	30	47	26	45	61	85
21	KALIMANTAN TIMUR	277	28	21	22	23	24	21	14	22	12	21	28	40
22	KALIMANTAN UTARA	33	3,4	2,6	2,7	2,8	2,9	2,5	1,7	2,7	1,5	2,5	3,4	4,8
23	SULAWESI UTARA	292	30	23	23	24	25	22	15	23	13	22	30	42
24	GORONTALO	300	30	23	24	25	26	23	15	24	13	23	31	43
25	SULAWESI TENGAH	499	51	38	40	41	43	38	25	40	22	38	51	72
26	SULAWESI TENGGARA	300	30	23	24	25	26	23	15	24	13	23	31	43
27	SULAWESI SELATAN	4.092	416	315	328	339	351	312	206	325	178	312	421	588
28	SULAWESI BARAT	360	37	28	29	30	31	27	18	29	16	27	37	52
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.985	202	153	159	165	171	151	100	158	87	151	204	285
30	NUSA TENGGARA TIMUR	362	37	28	29	30	31	28	18	29	16	28	37	52
31	MALUKU	42	4,3	3,2	3	3	4	3,2	2	3	2	3	4,3	6
32	PAPUA	95	10	7	8	8	8	7	5	8	4	7	10	14
33	MALUKU UTARA	4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5
34	PAPUA BARAT	18	1,8	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	0,9	1,4	0,8	1,4	1,8	2,6
	JUMLAH PROPINSI	62.730	6.372	4.835	5.023	5.204	5.388	4.784	3.162	4.984	2.735	4.776	6.453	9.014

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	21.770	3.172	1.781	2.225	2.342	2.024	1.530	936	1.712	807	1.616	1.761	1.866
2	SUMATERA UTARA	48.330	7.042	3.953	4.940	5.199	4.493	3.396	2.079	3.801	1.790	3.586	3.909	4.141
3	SUMATERA BARAT	26.300	3.832	2.151	2.688	2.829	2.445	1.848	1.131	2.069	974	1.952	2.127	2.254
4	J A M B I	17.700	2.579	1.448	1.809	1.904	1.645	1.244	761	1.392	656	1.313	1.432	1.517
5	R I A U	12.010	1.750	982	1.228	1.292	1.117	844	517	945	445	891	971	1.029
6	BENGKULU	8.330	1.214	681	851	896	774	585	358	655	309	618	674	714
7	SUMATERA SELATAN	43.600	6.353	3.566	4.456	4.690	4.053	3.064	1.875	3.429	1.615	3.235	3.526	3.736
8	BANGKA BELITUNG	3.930	573	321	402	423	365	276	169	309	146	292	318	337
9	LAMPUNG	46.560	6.784	3.808	4.759	5.008	4.328	3.272	2.003	3.662	1.725	3.455	3.766	3.990
10	KEP. RIAU	25	3,6	2	2,6	2,7	2,3	1,8	1,1	2	0,9	1,9	2	2,1
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	21.040	3.066	1.721	2.150	2.263	1.956	1.478	905	1.655	779	1.561	1.702	1.803
13	JAWA BARAT	154.000	22.439	12.596	15.740	16.565	14.317	10.821	6.624	12.113	5.705	11.428	12.456	13.197
14	D.I. YOGYAKARTA	3.670	535	300	375	395	341	258	158	289	136	272	297	314
15	JAWA TENGAH	158.650	23.116	12.976	16.215	17.066	14.749	11.148	6.824	12.478	5.877	11.773	12.832	13.595
16	JAWA TIMUR	165.280	24.082	13.518	16.893	17.779	15.365	11.614	7.109	13.000	6.123	12.265	13.368	14.163
17	B A L I	2.300	335	188	235	247	214	162	99	181	85	171	186	197
18	KALIMANTAN BARAT	13.220	1.926	1.081	1.351	1.422	1.229	929	569	1.040	490	981	1.069	1.133
19	KALIMANTAN TENGAH	4.530	660	371	463	487	421	318	195	356	168	336	366	388
20	KALIMANTAN SELATAN	8.120	1.183	664	830	873	755	571	349	639	301	603	657	696
21	KALIMANTAN TIMUR	5.370	782	439	549	578	499	377	231	422	199	398	434	460
22	KALIMANTAN UTARA	300	44	25	31	32	28	21	13	24	11	22	24	26
23	SULAWESI UTARA	4.230	616	346	432	455	393	297	182	333	157	314	342	362
24	GORONTALO	1.400	204	115	143	151	130	98	60	110	52	104	113	120
25	SULAWESI TENGAH	3.850	561	315	394	414	358	271	166	303	143	286	311	330
26	SULAWESI TENGGARA	7.240	1.055	592	740	779	673	509	311	569	268	537	586	620
27	SULAWESI SELATAN	39.180	5.709	3.205	4.005	4.215	3.642	2.753	1.685	3.082	1.451	2.907	3.169	3.357
28	SULAWESI BARAT	2.110	307	173	216	227	196	148	91	166	78	157	171	181
29	NUSA TENGGARA BARAT	18.330	2.671	1.499	1.873	1.972	1.704	1.288	788	1.442	679	1.360	1.483	1.571
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.570	812	456	569	599	518	391	240	438	206	413	451	477
31	MALUKU	180	26	15	18	19	17	13	8	14	7	13	15	15
32	PAPUA	2.570	374	210	263	276	239	181	111	202	95	191	208	220
33	MALUKU UTARA	25	3,6	2	2,6	2,7	2,3	1,8	1,1	2,0	0,9	1,9	2	2,1
34	PAPUA BARAT	280	41	23	29	30	26	20	12	22	10	21	23	24
	JUMLAH PROPINSI	850.000	123.850	69.522	86.877	91.433	79.021	59.727	36.560	66.856	31.490	63.076	68.750	72.838

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	16.273	2.371	1.331	1.663	1.750	1.513	1.143	700	1.280	603	1.208	1.316	1.394
2	SUMATERA UTARA	36.127	5.264	2.955	3.692	3.886	3.359	2.539	1.554	2.842	1.338	2.681	2.922	3.096
3	SUMATERA BARAT	19.659	2.864	1.608	2.009	2.115	1.828	1.381	846	1.546	728	1.459	1.590	1.685
4	J A M B I	13.231	1.928	1.082	1.352	1.423	1.230	930	569	1.041	490	982	1.070	1.134
5	R I A U	8.977	1.308	734	918	966	835	631	386	706	333	666	726	769
6	BENGKULU	6.227	907	509	636	670	579	438	268	490	231	462	504	534
7	SUMATERA SELATAN	32.591	4.749	2.666	3.331	3.506	3.030	2.290	1.402	2.563	1.207	2.419	2.636	2.793
8	BANGKA BELITUNG	2.938	428	240	300	316	273	206	126	231	109	218	238	252
9	LAMPUNG	34.804	5.071	2.847	3.557	3.744	3.236	2.446	1.497	2.737	1.289	2.583	2.815	2.982
10	KEP. RIAU	19	2,7	1,5	1,9	2	1,7	1,3	0,8	1,5	0,7	1,4	1,5	1,6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	15.727	2.292	1.286	1.607	1.692	1.462	1.105	676	1.237	583	1.167	1.272	1.348
13	JAWA BARAT	115.115	16.773	9.415	11.766	12.383	10.702	8.089	4.951	9.054	4.265	8.542	9.311	9.864
14	D.I. YOGYAKARTA	2.743	400	224	280	295	255	193	118	216	102	204	222	235
15	JAWA TENGAH	118.591	17.279	9.700	12.121	12.757	11.025	8.333	5.101	9.328	4.393	8.800	9.592	10.162
16	JAWA TIMUR	123.547	18.002	10.105	12.627	13.290	11.486	8.681	5.314	9.717	4.577	9.168	9.993	10.587
17	B A L I	1.719	251	141	176	185	160	121	74	135	64	128	139	147
18	KALIMANTAN BARAT	9.882	1.440	808	1.010	1.063	919	694	425	777	366	733	799	847
19	KALIMANTAN TENGAH	3.386	493	277	346	364	315	238	146	266	125	251	274	290
20	KALIMANTAN SELATAN	6.070	884	496	620	653	564	426	261	477	225	450	491	520
21	KALIMANTAN TIMUR	4.014	585	328	410	432	373	282	173	316	149	298	325	344
22	KALIMANTAN UTARA	224	33	18	23	24	21	16	10	18	8	17	18	19
23	SULAWESI UTARA	3.162	461	259	323	340	294	222	136	249	117	235	256	271
24	GORONTALO	1.047	152	86	107	113	97	74	45	82	39	78	85	90
25	SULAWESI TENGAH	2.878	419	235	294	310	268	202	124	226	107	214	233	247
26	SULAWESI TENGGARA	5.412	789	443	553	582	503	380	233	426	200	402	438	464
27	SULAWESI SELATAN	29.287	4.267	2.395	2.993	3.150	2.723	2.058	1.260	2.304	1.085	2.173	2.369	2.510
28	SULAWESI BARAT	1.577	230	129	161	170	147	111	68	124	58	117	128	135
29	NUSA TENGGARA BARAT	13.702	1.996	1.121	1.400	1.474	1.274	963	589	1.078	508	1.017	1.108	1.174
30	NUSA TENGGARA TIMUR	4.164	607	341	426	448	387	293	179	327	154	309	337	357
31	MALUKU	135	20	11	14	14	13	9	6	11	5	10	11	12
32	PAPUA	1.921	280	157	196	207	179	135	83	151	71	143	155	165
33	MALUKU UTARA	19	2,7	1,5	1,9	2,0	1,7	1,3	0,8	1,5	0,7	1,4	1,5	1,6
34	PAPUA BARAT	209	30	17	21	23	19	15	9	16	8	16	17	18
	JUMLAH PROPINSI	635.375	92.578	51.967	64.940	68.346	59.068	44.646	27.329	49.975	23.539	47.150	51.391	54.446

Lampiran 3.9. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.306	190	107	134	141	121	92	56	103	48	97	106	112
2	SUMATERA UTARA	2.900	423	237	296	312	270	204	125	228	107	215	235	248
3	SUMATERA BARAT	1.578	230	129	161	170	147	111	68	124	58	117	128	135
4	J A M B I	1.062	155	87	109	114	99	75	46	84	39	79	86	91
5	R I A U	721	105	59	74	78	67	51	31	57	27	53	58	62
6	BENGKULU	500	73	41	51	54	46	35	21	39	19	37	40	43
7	SUMATERA SELATAN	2.616	381	214	267	281	243	184	113	206	97	194	212	224
8	BANGKA BELITUNG	236	34	19	24	25	22	17	10	19	9	17	19	20
9	LAMPUNG	2.794	407	228	286	301	260	196	120	220	103	207	226	239
10	KEP. RIAU	1,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1.262	184	103	129	136	117	89	54	99	47	94	102	108
13	JAWA BARAT	9.240	1.346	756	944	994	859	649	397	727	342	686	747	792
14	D.I. YOGYAKARTA	220	32	18	23	24	20	15	9	17	8	16	18	19
15	JAWA TENGAH	9.519	1.387	779	973	1.024	885	669	409	749	353	706	770	816
16	JAWA TIMUR	9.917	1.445	811	1.014	1.067	922	697	427	780	367	736	802	850
17	B A L I	138	20	11	14	15	13	10	6	11	5	10	11	12
18	KALIMANTAN BARAT	793	116	65	81	85	74	56	34	62	29	59	64	68
19	KALIMANTAN TENGAH	272	40	22	28	29	25	19	12	21	10	20	22	23
20	KALIMANTAN SELATAN	487	71	40	50	52	45	34	21	38	18	36	39	42
21	KALIMANTAN TIMUR	322	47	26	33	35	30	23	14	25	12	24	26	28
22	KALIMANTAN UTARA	18	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
23	SULAWESI UTARA	254	37	21	26	27	24	18	11	20	9	19	21	22
24	GORONTALO	84	12	7	9	9	8	6	4	7	3	6	7	7
25	SULAWESI TENGAH	231	34	19	24	25	21	16	10	18	9	17	19	20
26	SULAWESI TENGGARA	434	63	36	44	47	40	31	19	34	16	32	35	37
27	SULAWESI SELATAN	2.351	343	192	240	253	219	165	101	185	87	174	190	201
28	SULAWESI BARAT	127	18	10	13	14	12	9	5	10	5	9	10	11
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.100	160	90	112	118	102	77	47	87	41	82	89	94
30	NUSA TENGGARA TIMUR	334	49	27	34	36	31	23	14	26	12	25	27	29
31	MALUKU	11	1,6	0,9	1,1	1,2	1	0,8	0,5	0,8	0,4	0,8	0,9	0,9
32	PAPUA	154	22	13	16	17	14	11	7	12	6	11	12	13
33	MALUKU UTARA	1,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34	PAPUA BARAT	17	2,4	1,4	1,7	1,8	1,6	1,2	0,7	1,3	0,6	1,2	1,4	1,4
	JUMLAH PROPINSI	51.000	7.431	4.171	5.213	5.486	4.741	3.584	2.194	4.011	1.889	3.785	4.125	4.370

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	3.655	533	299	374	393	340	257	157	287	135	271	296	313
2	SUMATERA UTARA	8.115	1.182	664	829	873	754	570	349	638	301	602	656	695
3	SUMATERA BARAT	4.416	643	361	451	475	411	310	190	347	164	328	357	378
4	J A M B I	2.972	433	243	304	320	276	209	128	234	110	221	240	255
5	R I A U	2.016	294	165	206	217	187	142	87	159	75	150	163	173
6	BENGKULU	1.399	204	114	143	150	130	98	60	110	52	104	113	120
7	SUMATERA SELATAN	7.320	1.067	599	748	787	681	514	315	576	271	543	592	627
8	BANGKA BELITUNG	660	96	54	67	71	61	46	28	52	24	49	53	57
9	LAMPUNG	7.817	1.139	639	799	841	727	549	336	615	290	580	632	670
10	KEP. RIAU	4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	3.533	515	289	361	380	328	248	152	278	131	262	286	303
13	JAWA BARAT	25.857	3.767	2.115	2.643	2.781	2.404	1.817	1.112	2.034	958	1.919	2.091	2.216
14	D.I. YOGYAKARTA	616	90	50	63	66	57	43	27	48	23	46	50	53
15	JAWA TENGAH	26.637	3.881	2.179	2.723	2.865	2.476	1.872	1.146	2.095	987	1.977	2.154	2.283
16	JAWA TIMUR	27.751	4.043	2.270	2.836	2.985	2.580	1.950	1.194	2.183	1.028	2.059	2.245	2.378
17	B A L I	386	56	32	39	42	36	27	17	30	14	29	31	33
18	KALIMANTAN BARAT	2.220	323	182	227	239	206	156	95	175	82	165	180	190
19	KALIMANTAN TENGAH	761	111	62	78	82	71	53	33	60	28	56	62	65
20	KALIMANTAN SELATAN	1.363	199	112	139	147	127	96	59	107	51	101	110	117
21	KALIMANTAN TIMUR	902	131	74	92	97	84	63	39	71	33	67	73	77
22	KALIMANTAN UTARA	50	7	4	5	5	5	4	2	4	2	4	4	4
23	SULAWESI UTARA	710	103	58	73	76	66	50	31	56	26	53	57	61
24	GORONTALO	235	34	19	24	25	22	17	10	18	9	17	19	20
25	SULAWESI TENGAH	646	94	53	66	70	60	45	28	51	24	48	52	55
26	SULAWESI TENGGARA	1.216	177	99	124	131	113	85	52	96	45	90	98	104
27	SULAWESI SELATAN	6.578	959	538	672	708	612	462	283	517	244	488	532	564
28	SULAWESI BARAT	354	52	29	36	38	33	25	15	28	13	26	29	30
29	NUSA TENGGARA BARAT	3.078	448	252	315	331	286	216	132	242	114	228	249	264
30	NUSA TENGGARA TIMUR	935	136	76	96	101	87	66	40	74	35	69	76	80
31	MALUKU	30	4	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	3
32	PAPUA	432	63	35	44	46	40	30	19	34	16	32	35	37
33	MALUKU UTARA	4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
34	PAPUA BARAT	47	7	4	5	5	4	3	2	4	2	3	4	4
	JUMLAH PROPINSI	142.715	20.794	11.673	14.587	15.352	13.268	10.028	6.138	11.225	5.287	10.590	11.543	12.230

Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	131	19,0	10,7	13,4	14,1	12,1	9,2	5,6	10,3	4,8	9,7	10,6	11,2
2	SUMATERA UTARA	290	42,3	23,7	29,6	31,2	27,0	20,4	12,5	22,8	10,7	21,5	23,5	24,8
3	SUMATERA BARAT	158	23,0	12,9	16,1	17,0	14,7	11,1	6,8	12,4	5,8	11,7	12,8	13,5
4	J A M B I	106	15,5	8,7	10,9	11,4	9,9	7,5	4,6	8,4	3,9	7,9	8,6	9,1
5	R I A U	72	10,5	5,9	7,4	7,8	6,7	5,1	3,1	5,7	2,7	5,3	5,8	6,2
6	BENGKULU	50	7,3	4,1	5,1	5,4	4,6	3,5	2,1	3,9	1,9	3,7	4,0	4,3
7	SUMATERA SELATAN	262	38,1	21,4	26,7	28,1	24,3	18,4	11,3	20,6	9,7	19,4	21,2	22,4
8	BANGKA BELITUNG	24	3,4	1,9	2,4	2,5	2,2	1,7	1,0	1,9	0,9	1,7	1,9	2,0
9	LAMPUNG	279	40,7	22,8	28,6	30,1	26,0	19,6	12,0	22,0	10,3	20,7	22,6	23,9
10	KEP. RIAU	0,2	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	126	18,4	10,3	12,9	13,6	11,7	8,9	5,4	9,9	4,7	9,4	10,2	10,8
13	JAWA BARAT	924	134,6	75,6	94,4	99,4	85,9	64,9	39,7	72,7	34,2	68,6	74,7	79,2
14	D.I. YOGYAKARTA	22	3,2	1,8	2,3	2,4	2,0	1,5	0,9	1,7	0,8	1,6	1,8	1,9
15	JAWA TENGAH	952	138,7	77,9	97,3	102,4	88,5	66,9	40,9	74,9	35,3	70,6	77,0	81,6
16	JAWA TIMUR	992	144,5	81,1	101,4	106,7	92,2	69,7	42,7	78,0	36,7	73,6	80,2	85,0
17	B A L I	14	2,0	1,1	1,4	1,5	1,3	1,0	0,6	1,1	0,5	1,0	1,1	1,2
18	KALIMANTAN BARAT	79	11,6	6,5	8,1	8,5	7,4	5,6	3,4	6,2	2,9	5,9	6,4	6,8
19	KALIMANTAN TENGAH	27	4,0	2,2	2,8	2,9	2,5	1,9	1,2	2,1	1,0	2,0	2,2	2,3
20	KALIMANTAN SELATAN	49	7,1	4,0	5,0	5,2	4,5	3,4	2,1	3,8	1,8	3,6	3,9	4,2
21	KALIMANTAN TIMUR	32	4,7	2,6	3,3	3,5	3,0	2,3	1,4	2,5	1,2	2,4	2,6	2,8
22	KALIMANTAN UTARA	1,8	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
23	SULAWESI UTARA	25	3,7	2,1	2,6	2,7	2,4	1,8	1,1	2,0	0,9	1,9	2,1	2,2
24	GORONTALO	8	1,2	0,7	0,9	0,9	0,8	0,6	0,4	0,7	0,3	0,6	0,7	0,7
25	SULAWESI TENGAH	23	3,4	1,9	2,4	2,5	2,1	1,6	1,0	1,8	0,9	1,7	1,9	2,0
26	SULAWESI TENGGARA	43	6,3	3,6	4,4	4,7	4,0	3,1	1,9	3,4	1,6	3,2	3,5	3,7
27	SULAWESI SELATAN	235	34,3	19,2	24,0	25,3	21,9	16,5	10,1	18,5	8,7	17,4	19,0	20,1
28	SULAWESI BARAT	13	1,8	1,0	1,3	1,4	1,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,9	1,0	1,1
29	NUSA TENGGARA BARAT	110	16,0	9,0	11,2	11,8	10,2	7,7	4,7	8,7	4,1	8,2	8,9	9,4
30	NUSA TENGGARA TIMUR	33	4,9	2,7	3,4	3,6	3,1	2,3	1,4	2,6	1,2	2,5	2,7	2,9
31	MALUKU	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1
32	PAPUA	15	2,2	1,3	1,6	1,7	1,4	1,1	0,7	1,2	0,6	1,1	1,2	1,3
33	MALUKU UTARA	0,2	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
34	PAPUA BARAT	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	JUMLAH PROPINSI	5.100	744	417	521	549	474	358	219	401	189	378	413	437

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	405	59	33	41	44	38	28	17	32	15	30	33	35
2	SUMATERA UTARA	899	131	74	92	97	84	63	39	71	33	67	73	77
3	SUMATERA BARAT	489	71	40	50	53	45	34	21	38	18	36	40	42
4	J A M B I	329	48	27	34	35	31	23	14	26	12	24	27	28
5	R I A U	223	33	18	23	24	21	16	10	18	8	17	18	19
6	BENGKULU	155	23	13	16	17	14	11	7	12	6	11	13	13
7	SUMATERA SELATAN	811	118	66	83	87	75	57	35	64	30	60	66	69
8	BANGKA BELITUNG	73	11	6	7	8	7	5	3	6	3	5	6	6
9	LAMPUNG	866	126	71	89	93	81	61	37	68	32	64	70	74
10	KEP. RIAU	0,5	0,1	0,04	0,05	0,1	0,04	0,03	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04	0,04
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	391	57	32	40	42	36	27	17	31	14	29	32	34
13	JAWA BARAT	2.864	417	234	293	308	266	201	123	225	106	213	232	245
14	D.I. YOGYAKARTA	68	10	6	7	7	6	5	3	5	3	5	6	6
15	JAWA TENGAH	2.951	430	241	302	317	274	207	127	232	109	219	239	253
16	JAWA TIMUR	3.074	448	251	314	331	286	216	132	242	114	228	249	263
17	B A L I	43	6	3	4	5	4	3	2	3	2	3	3	4
18	KALIMANTAN BARAT	246	36	20	25	26	23	17	11	19	9	18	20	21
19	KALIMANTAN TENGAH	84	12	7	9	9	8	6	4	7	3	6	7	7
20	KALIMANTAN SELATAN	151	22	12	15	16	14	11	6	12	6	11	12	13
21	KALIMANTAN TIMUR	100	15	8	10	11	9	7	4	8	4	7	8	9
22	KALIMANTAN UTARA	6	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5	0,5
23	SULAWESI UTARA	79	11	6	8	8	7	6	3	6	3	6	6	7
24	GORONTALO	26	4	2	3	3	2	2	1	2	1	2	2	2
25	SULAWESI TENGAH	72	10	6	7	8	7	5	3	6	3	5	6	6
26	SULAWESI TENGGARA	135	20	11	14	14	13	9	6	11	5	10	11	12
27	SULAWESI SELATAN	729	106	60	74	78	68	51	31	57	27	54	59	62
28	SULAWESI BARAT	39	6	3	4	4	4	3	2	3	1	3	3	3
29	NUSA TENGGARA BARAT	341	50	28	35	37	32	24	15	27	13	25	28	29
30	NUSA TENGGARA TIMUR	104	15	8	11	11	10	7	4	8	4	8	8	9
31	MALUKU	3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
32	PAPUA	48	7	4	5	5	4	3	2	4	2	4	4	4
33	MALUKU UTARA	0,5	0,1	0,04	0,05	0,1	0,04	0,03	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04	0,04
34	PAPUA BARAT	5	0,8	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
	JUMLAH PROPINSI	15.810	2.303	1.293	1.616	1.701	1.470	1.111	680	1.244	586	1.173	1.279	1.354

Lampiran 3.13. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	10.680	1.275	833	980	884	845	869	507	1.007	477	907	1.001	1.094
2	SUMATERA UTARA	53.270	6.360	4.154	4.889	4.412	4.214	4.335	2.531	5.022	2.381	4.526	4.993	5.454
3	SUMATERA BARAT	18.820	2.247	1.468	1.727	1.559	1.489	1.532	894	1.774	841	1.599	1.764	1.927
4	J A M B I	6.880	821	537	631	570	544	560	327	649	308	585	645	704
5	R I A U	8.550	1.021	667	785	708	676	696	406	806	382	726	801	875
6	BENGKULU	4.700	561	367	431	389	372	382	223	443	210	399	440	481
7	SUMATERA SELATAN	7.890	942	615	724	653	624	642	375	744	353	670	739	808
8	BANGKA BELITUNG	1.970	235	154	181	163	156	160	94	186	88	167	185	202
9	LAMPUNG	21.350	2.549	1.665	1.959	1.768	1.689	1.737	1.014	2.013	954	1.814	2.001	2.186
10	KEP. RIAU	20	2,4	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,0	1,9	0,9	1,7	1,9	2,0
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1.470	176	115	135	122	116	120	70	139	66	125	138	151
13	JAWA BARAT	71.300	8.512	5.560	6.543	5.905	5.640	5.802	3.387	6.722	3.187	6.058	6.682	7.300
14	D.I. YOGYAKARTA	9.750	1.164	760	895	807	771	793	463	919	436	828	914	998
15	JAWA TENGAH	213.315	25.468	16.635	19.576	17.666	16.875	17.359	10.134	20.110	9.534	18.125	19.992	21.841
16	JAWA TIMUR	500.270	59.727	39.013	45.909	41.430	39.575	40.711	23.766	47.163	22.360	42.508	46.886	51.223
17	B A L I	7.030	839	548	645	582	556	572	334	663	314	597	659	720
18	KALIMANTAN BARAT	4.200	501	328	385	348	332	342	200	396	188	357	394	430
19	KALIMANTAN TENGAH	1.520	181	119	139	126	120	124	72	143	68	129	142	156
20	KALIMANTAN SELATAN	1.860	222	145	171	154	147	151	88	175	83	158	174	190
21	KALIMANTAN TIMUR	2.650	316	207	243	219	210	216	126	250	118	225	248	271
22	KALIMANTAN UTARA	90	11	7	8	7	7	7	4	8	4	8	8	9
23	SULAWESI UTARA	510	61	40	47	42	40	42	24	48	23	43	48	52
24	GORONTALO	510	61	40	47	42	40	42	24	48	23	43	48	52
25	SULAWESI TENGAH	9.450	1.128	737	867	783	748	769	449	891	422	803	886	968
26	SULAWESI TENGGARA	4.110	491	321	377	340	325	334	195	387	184	349	385	421
27	SULAWESI SELATAN	63.280	7.555	4.935	5.807	5.241	5.006	5.150	3.006	5.966	2.828	5.377	5.931	6.479
28	SULAWESI BARAT	6.610	789	515	607	547	523	538	314	623	295	562	619	677
29	NUSA TENGGARA BARAT	14.410	1.720	1.124	1.322	1.193	1.140	1.173	685	1.358	644	1.224	1.351	1.475
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.440	291	190	224	202	193	199	116	230	109	207	229	250
31	MALUKU	210	25	16	19	17	17	17	10	20	9	18	20	22
32	PAPUA	610	73	48	56	51	48	50	29	58	27	52	57	62
33	MALUKU UTARA	95	11	7	9	8	8	8	5	9	4	8	9	10
34	PAPUA BARAT	180	21	14	17	15	14	15	9	17	8	15	17	18
	JUMLAH PROPINSI	1.050.000	125.359	81.883	96.358	86.956	83.062	85.446	49.883	98.988	46.931	89.218	98.407	107.509

Lampiran 3.14. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	8.263	987	644	758	684	654	672	393	779	369	702	774	846
2	SUMATERA UTARA	41.215	4.921	3.214	3.782	3.413	3.260	3.354	1.958	3.886	1.842	3.502	3.863	4.220
3	SUMATERA BARAT	14.561	1.738	1.136	1.336	1.206	1.152	1.185	692	1.373	651	1.237	1.365	1.491
4	J A M B I	5.323	636	415	488	441	421	433	253	502	238	452	499	545
5	R I A U	6.615	790	516	607	548	523	538	314	624	296	562	620	677
6	BENGKULU	3.636	434	284	334	301	288	296	173	343	163	309	341	372
7	SUMATERA SELATAN	6.104	729	476	560	506	483	497	290	575	273	519	572	625
8	BANGKA BELITUNG	1.524	182	119	140	126	121	124	72	144	68	130	143	156
9	LAMPUNG	16.518	1.972	1.288	1.516	1.368	1.307	1.344	785	1.557	738	1.404	1.548	1.691
10	KEP. RIAU	15	1,8	1,2	1,4	1,3	1,2	1,3	0,7	1,5	0,7	1,3	1,5	1,6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1.137	136	89	104	94	90	93	54	107	51	97	107	116
13	JAWA BARAT	55.165	6.586	4.302	5.062	4.569	4.364	4.489	2.621	5.201	2.466	4.687	5.170	5.648
14	D.I. YOGYAKARTA	7.544	901	588	692	625	597	614	358	711	337	641	707	772
15	JAWA TENGAH	165.042	19.704	12.871	15.146	13.668	13.056	13.431	7.841	15.559	7.377	14.023	15.468	16.899
16	JAWA TIMUR	387.059	46.211	30.184	35.520	32.055	30.619	31.498	18.388	36.490	17.300	32.888	36.276	39.631
17	B A L I	5.439	649	424	499	450	430	443	258	513	243	462	510	557
18	KALIMANTAN BARAT	3.250	388	253	298	269	257	264	154	306	145	276	305	333
19	KALIMANTAN TENGAH	1.176	140	92	108	97	93	96	56	111	53	100	110	120
20	KALIMANTAN SELATAN	1.439	172	112	132	119	114	117	68	136	64	122	135	147
21	KALIMANTAN TIMUR	2.050	245	160	188	170	162	167	97	193	92	174	192	210
22		70	8	5	6	6	6	6	3	7	3	6	7	7
23	SULAWESI UTARA	395	47	31	36	33	31	32	19	37	18	34	37	40
24	GORONTALO	395	47	31	36	33	31	32	19	37	18	34	37	40
25	SULAWESI TENGAH	7.311	873	570	671	606	578	595	347	689	327	621	685	749
26	SULAWESI TENGGARA	3.180	380	248	292	263	252	259	151	300	142	270	298	326
27	SULAWESI SELATAN	48.960	5.845	3.818	4.493	4.055	3.873	3.984	2.326	4.616	2.188	4.160	4.589	5.013
28	SULAWESI BARAT	5.114	611	399	469	424	405	416	243	482	229	435	479	524
29	NUSA TENGGARA BARAT	11.149	1.331	869	1.023	923	882	907	530	1.051	498	947	1.045	1.142
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1.888	225	147	173	156	149	154	90	178	84	160	177	193
31	MALUKU	162	19	13	15	13	13	13	8	15	7	14	15	17
32	PAPUA	472	56	37	43	39	37	38	22	44	21	40	44	48
33	MALUKU UTARA	74	9	6	7	6	6	6	3	7	3	6	7	8
34	PAPUA BARAT	139	17	11	13	12	11	11	7	13	6	12	13	14
	JUMLAH PROPINSI	812.385	96.990	63.353	74.552	67.278	64.265	66.110	38.594	76.587	36.310	69.028	76.138	83.180

Lampiran 3.15. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	502	60	39	46	42	40	41	24	47	22	43	47	51
2	SUMATERA UTARA	2.504	299	195	230	207	198	204	119	236	112	213	235	256
3	SUMATERA BARAT	885	106	69	81	73	70	72	42	83	40	75	83	91
4	J A M B I	323	39	25	30	27	26	26	15	30	14	27	30	33
5	R I A U	402	48	31	37	33	32	33	19	38	18	34	38	41
6	BENGKULU	221	26	17	20	18	17	18	10	21	10	19	21	23
7	SUMATERA SELATAN	371	44	29	34	31	29	30	18	35	17	32	35	38
8	BANGKA BELITUNG	93	11	7	8	8	7	8	4	9	4	8	9	9
9	LAMPUNG	1.003	120	78	92	83	79	82	48	95	45	85	94	103
10	KEP. RIAU	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	69	8	5	6	6	5	6	3	7	3	6	6	7
13	JAWA BARAT	3.351	400	261	308	278	265	273	159	316	150	285	314	343
14	D.I. YOGYAKARTA	458	55	36	42	38	36	37	22	43	20	39	43	47
15	JAWA TENGAH	10.026	1.197	782	920	830	793	816	476	945	448	852	940	1.027
16	JAWA TIMUR	23.513	2.807	1.834	2.158	1.947	1.860	1.913	1.117	2.217	1.051	1.998	2.204	2.407
17	B A L I	330	39	26	30	27	26	27	16	31	15	28	31	34
18	KALIMANTAN BARAT	197	24	15	18	16	16	16	9	19	9	17	19	20
19	KALIMANTAN TENGAH	71	9	6	7	6	6	6	3	7	3	6	7	7
20	KALIMANTAN SELATAN	87	10	7	8	7	7	7	4	8	4	7	8	9
21	KALIMANTAN TIMUR	125	15	10	11	10	10	10	6	12	6	11	12	13
22	KALIMANTAN UTARA	4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
23	SULAWESI UTARA	24	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
24	GORONTALO	24	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
25	SULAWESI TENGAH	444	53	35	41	37	35	36	21	42	20	38	42	45
26	SULAWESI TENGGARA	193	23	15	18	16	15	16	9	18	9	16	18	20
27	SULAWESI SELATAN	2.974	355	232	273	246	235	242	141	280	133	253	279	305
28	SULAWESI BARAT	311	37	24	29	26	25	25	15	29	14	26	29	32
29	NUSA TENGGARA BARAT	677	81	53	62	56	54	55	32	64	30	58	63	69
30	NUSA TENGGARA TIMUR	115	14	9	11	9	9	9	5	11	5	10	11	12
31	MALUKU	10	1,2	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,9	0,4	0,8	0,9	1,0
32	PAPUA	29	3,4	2,2	2,6	2,4	2,3	2,3	1,4	2,7	1,3	2,4	2,7	2,9
33	MALUKU UTARA	4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5
34	PAPUA BARAT	8	1	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,4	0,8	0,4	0,7	0,8	0,9
	JUMLAH PROPINSI	49.350	5.892	3.848	4.529	4.087	3.904	4.016	2.344	4.652	2.206	4.193	4.626	5.053

Lampiran 3.16. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.779	212	139	163	147	141	145	85	168	80	151	167	182
2	SUMATERA UTARA	8.875	1.060	692	814	735	702	722	422	837	397	754	832	909
3	SUMATERA BARAT	3.135	374	245	288	260	248	255	149	296	140	266	294	321
4	J A M B I	1.146	137	89	105	95	91	93	54	108	51	97	107	117
5	R I A U	1.424	170	111	131	118	113	116	68	134	64	121	133	146
6	BENGKULU	783	93	61	72	65	62	64	37	74	35	67	73	80
7	SUMATERA SELATAN	1.314	157	103	121	109	104	107	62	124	59	112	123	135
8	BANGKA BELITUNG	328	39	26	30	27	26	27	16	31	15	28	31	34
9	LAMPUNG	3.557	425	277	326	295	281	289	169	335	159	302	333	364
10	KEP. RIAU	3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	245	29	19	22	20	19	20	12	23	11	21	23	25
13	JAWA BARAT	11.879	1.418	926	1.090	984	940	967	564	1.120	531	1.009	1.113	1.216
14	D.I. YOGYAKARTA	1.624	194	127	149	135	128	132	77	153	73	138	152	166
15	JAWA TENGAH	35.538	4.243	2.771	3.261	2.943	2.811	2.892	1.688	3.350	1.588	3.020	3.331	3.639
16	JAWA TIMUR	83.345	9.951	6.500	7.648	6.902	6.593	6.782	3.959	7.857	3.725	7.082	7.811	8.534
17	B A L I	1.171	140	91	107	97	93	95	56	110	52	100	110	120
18	KALIMANTAN BARAT	700	84	55	64	58	55	57	33	66	31	59	66	72
19	KALIMANTAN TENGAH	253	30	20	23	21	20	21	12	24	11	22	24	26
20	KALIMANTAN SELATAN	310	37	24	28	26	25	25	15	29	14	26	29	32
21	KALIMANTAN TIMUR	441	53	34	41	37	35	36	21	42	20	38	41	45
22	KALIMANTAN UTARA	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
23	SULAWESI UTARA	85	10	7	8	7	7	7	4	8	4	7	8	9
24	GORONTALO	85	10	7	8	7	7	7	4	8	4	7	8	9
25	SULAWESI TENGAH	1.574	188	123	144	130	125	128	75	148	70	134	148	161
26	SULAWESI TENGGARA	685	82	53	63	57	54	56	33	65	31	58	64	70
27	SULAWESI SELATAN	10.542	1.259	822	967	873	834	858	501	994	471	896	988	1.079
28	SULAWESI BARAT	1.101	131	86	101	91	87	90	52	104	49	94	103	113
29	NUSA TENGGARA BARAT	2.401	287	187	220	199	190	195	114	226	107	204	225	246
30	NUSA TENGGARA TIMUR	407	49	32	37	34	32	33	19	38	18	35	38	42
31	MALUKU	35	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4
32	PAPUA	102	12	8	9	8	8	8	5	10	5	9	10	10
33	MALUKU UTARA	16	2	1,2	1,5	1,3	1,3	1,3	0,8	1,5	0,7	1,3	1,5	1,6
34	PAPUA BARAT	30	4	2	3	2	2	2	1	3	1	3	3	3
	JUMLAH PROPINSI	174.930	20.885	13.642	16.053	14.487	13.838	14.235	8.310	16.491	7.819	14.864	16.395	17.911

Lampiran 3.17. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	121	14	9	11	10	10	10	6	11	5	10	11	12
2	SUMATERA UTARA	602	72	47	55	50	48	49	29	57	27	51	56	62
3	SUMATERA BARAT	213	25	17	20	18	17	17	10	20	10	18	20	22
4	J A M B I	78	9	6	7	6	6	6	4	7	3	7	7	8
5	R I A U	97	12	8	9	8	8	8	5	9	4	8	9	10
6	BENGKULU	53	6	4	5	4	4	4	3	5	2	5	5	5
7	SUMATERA SELATAN	89	11	7	8	7	7	7	4	8	4	8	8	9
8	BANGKA BELITUNG	22	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
9	LAMPUNG	241	29	19	22	20	19	20	11	23	11	20	23	25
10	KEP. RIAU	0,2	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	17	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2
13	JAWA BARAT	806	96	63	74	67	64	66	38	76	36	68	76	82
14	D.I. YOGYAKARTA	110	13	9	10	9	9	9	5	10	5	9	10	11
15	JAWA TENGAH	2.410	288	188	221	200	191	196	115	227	108	205	226	247
16	JAWA TIMUR	5.653	675	441	519	468	447	460	269	533	253	480	530	579
17	B A L I	79	9	6	7	7	6	6	4	7	4	7	7	8
18	KALIMANTAN BARAT	47	6	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	5
19	KALIMANTAN TENGAH	17	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2
20	KALIMANTAN SELATAN	21	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
21	KALIMANTAN TIMUR	30	4	2	3	2	2	2	1	3	1	3	3	3
22	KALIMANTAN UTARA	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1
23	SULAWESI UTARA	5,8	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6
24	GORONTALO	5,8	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6
25	SULAWESI TENGAH	107	13	8	10	9	8	9	5	10	5	9	10	11
26	SULAWESI TENGGARA	46	6	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	5
27	SULAWESI SELATAN	715	85	56	66	59	57	58	34	67	32	61	67	73
28	SULAWESI BARAT	75	9	6	7	6	6	6	4	7	3	6	7	8
29	NUSA TENGGARA BARAT	163	19	13	15	13	13	13	8	15	7	14	15	17
30	NUSA TENGGARA TIMUR	28	3	2	3	2	2	2	1	3	1	2	3	3
31	MALUKU	2,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
32	PAPUA	6,9	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,6	0,7
33	MALUKU UTARA	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1
34	PAPUA BARAT	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
	JUMLAH PROPINSI	11.865	1.416	925	1.089	983	939	966	564	1.119	530	1.008	1.112	1.214

Lampiran 3.18. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	ACEH	15	1,8	1,2	1,4	1,2	1,2	1,2	0,7	1,4	0,7	1,3	1,4	1,5
2	SUMATERA UTARA	75	8,9	5,8	6,8	6,2	5,9	6,1	3,5	7,0	3,3	6,3	7,0	7,6
3	SUMATERA BARAT	26	3,1	2,1	2,4	2,2	2,1	2,1	1,3	2,5	1,2	2,2	2,5	2,7
4	J A M B I	10	1,1	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,9	0,4	0,8	0,9	1,0
5	R I A U	12	1,4	0,9	1,1	1,0	0,9	1,0	0,6	1,1	0,5	1,0	1,1	1,2
6	BENGKULU	7	0,8	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,3	0,6	0,6	0,7
7	SUMATERA SELATAN	11	1,3	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,5	1,0	0,5	0,9	1,0	1,1
8	BANGKA BELITUNG	3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
9	LAMPUNG	30	4	2	3	2	2	2	1	3	1	3	3	3
10	KEP. RIAU	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	0,00	0,00
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
13	JAWA BARAT	100	12	8	9	8	8	8	5	9	4	8	9	10
14	D.I. YOGYAKARTA	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	JAWA TENGAH	299	36	23	27	25	24	24	14	28	13	25	28	31
16	JAWA TIMUR	700	84	55	64	58	55	57	33	66	31	60	66	72
17	B A L I	10	1,2	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,9	0,4	0,8	0,9	1
18	KALIMANTAN BARAT	5,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6
19	KALIMANTAN TENGAH	2,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
20	KALIMANTAN SELATAN	2,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
21	KALIMANTAN TIMUR	3,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
22	KALIMANTAN UTARA	0,1	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
23	SULAWESI UTARA	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1
24	GORONTALO	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1
25	SULAWESI TENGAH	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	SULAWESI TENGGARA	6	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6
27	SULAWESI SELATAN	89	11	7	8	7	7	7	4	8	4	8	8	9
28	SULAWESI BARAT	9	1,1	0,7	1	0,8	0,7	0,8	0,4	0,9	0,4	1	1	0,9
29	NUSA TENGGARA BARAT	20	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
31	MALUKU	0,3	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03
32	PAPUA	1	0,1	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,04	0,08	0,04	0,07	0,08	0,09
33	MALUKU UTARA	0,1	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
34	PAPUA BARAT	0,3	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03
	JUMLAH PROPINSI	1.470	175	115	135	122	116	120	70	139	66	125	137	150

Lampiran 3.19. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	49.230	5.417	3.957	4.852	4.861	4.557	3.943	2.467	4.017	2.405	3.938	4.463	4.353
2	SUMATERA UTARA	142.830	15.715	11.480	14.078	14.102	13.221	11.438	7.158	11.655	6.977	11.425	12.949	12.631
3	SUMATERA BARAT	61.730	6.792	4.961	6.085	6.095	5.714	4.944	3.094	5.037	3.015	4.938	5.597	5.459
4	J A M B I	44.210	4.864	3.553	4.358	4.365	4.092	3.540	2.216	3.608	2.159	3.536	4.008	3.910
5	R I A U	49.750	5.474	3.999	4.904	4.912	4.605	3.984	2.493	4.060	2.430	3.980	4.510	4.399
6	BENGKULU	20.480	2.253	1.646	2.019	2.022	1.896	1.640	1.026	1.671	1.000	1.638	1.857	1.811
7	SUMATERA SELATAN	112.290	12.355	9.025	11.068	11.087	10.394	8.993	5.628	9.163	5.485	8.982	10.181	9.930
8	BANGKA BELITUNG	20.250	2.228	1.628	1.996	1.999	1.874	1.622	1.015	1.652	989	1.620	1.836	1.791
9	LAMPUNG	160.080	17.613	12.866	15.779	15.806	14.818	12.820	8.023	13.063	7.819	12.805	14.513	14.156
10	KEP. RIAU	270	30	22	27	27	25	22	14	22	13	22	24	24
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	27.890	3.069	2.242	2.749	2.754	2.582	2.234	1.398	2.276	1.362	2.231	2.529	2.466
13	JAWA BARAT	336.080	36.978	27.011	33.127	33.183	31.109	26.914	16.843	27.425	16.416	26.884	30.470	29.720
14	D.I. YOGYAKARTA	24.250	2.668	1.949	2.390	2.394	2.245	1.942	1.215	1.979	1.185	1.940	2.199	2.144
15	JAWA TENGAH	420.340	46.249	33.784	41.432	41.502	38.908	33.662	21.066	34.301	20.532	33.624	38.109	37.171
16	JAWA TIMUR	611.870	67.322	49.177	60.311	60.413	56.637	49.001	30.665	49.930	29.887	48.945	55.474	54.108
17	B A L I	24.560	2.702	1.974	2.421	2.425	2.273	1.967	1.231	2.004	1.200	1.965	2.227	2.172
18	KALIMANTAN BARAT	91.710	10.091	7.371	9.040	9.055	8.489	7.344	4.596	7.484	4.480	7.336	8.315	8.110
19	KALIMANTAN TENGAH	33.840	3.723	2.720	3.336	3.341	3.132	2.710	1.696	2.761	1.653	2.707	3.068	2.993
20	KALIMANTAN SELATAN	38.690	4.257	3.110	3.814	3.820	3.581	3.098	1.939	3.157	1.890	3.095	3.508	3.421
21	KALIMANTAN TIMUR	32.280	3.552	2.594	3.182	3.187	2.988	2.585	1.618	2.634	1.577	2.582	2.927	2.855
22	KALIMANTAN UTARA	3.000	330	241	296	296	278	240	150	245	147	240	272	265
23	SULAWESI UTARA	3.090	340	248	305	305	286	247	155	252	151	247	280	273
24	GORONTALO	18.570	2.043	1.493	1.830	1.834	1.719	1.487	931	1.515	907	1.485	1.684	1.642
25	SULAWESI TENGAH	31.340	3.448	2.519	3.089	3.094	2.901	2.510	1.571	2.557	1.531	2.507	2.841	2.771
26	SULAWESI TENGGARA	15.890	1.748	1.277	1.566	1.569	1.471	1.273	796	1.297	776	1.271	1.441	1.405
27	SULAWESI SELATAN	115.220	12.677	9.260	11.357	11.376	10.665	9.227	5.774	9.402	5.628	9.217	10.446	10.189
28	SULAWESI BARAT	19.930	2.193	1.602	1.964	1.968	1.845	1.596	999	1.626	974	1.594	1.807	1.762
29	NUSA TENGGARA BARAT	10.130	1.115	814	998	1.000	938	811	508	827	495	810	918	896
30	NUSA TENGGARA TIMUR	16.910	1.861	1.359	1.667	1.670	1.565	1.354	847	1.380	826	1.353	1.533	1.495
31	MALUKU	3.480	383	280	343	344	322	279	174	284	170	278	316	308
32	PAPUA	6.910	760	555	681	682	640	553	346	564	338	553	626	611
33	MALUKU UTARA	330	36	27	33	33	31	26	17	27	16	26	30	29
34	PAPUA BARAT	2.570	283	207	253	254	238	206	129	210	126	206	233	227
	JUMLAH PROPINSI	2.550.000	280.568	204.949	251.347	251.775	236.036	204.213	127.796	208.087	124.558	203.981	231.191	225.499

Lampiran 3.20. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	38.970	4.288	3.132	3.841	3.848	3.607	3.121	1.953	3.180	1.904	3.117	3.533	3.446
2	SUMATERA UTARA	113.064	12.440	9.087	11.144	11.163	10.466	9.055	5.666	9.226	5.523	9.044	10.251	9.998
3	SUMATERA BARAT	48.865	5.377	3.927	4.817	4.825	4.523	3.913	2.449	3.988	2.387	3.909	4.430	4.321
4	J A M B I	34.997	3.851	2.813	3.450	3.455	3.239	2.803	1.754	2.856	1.709	2.799	3.173	3.095
5	R I A U	39.382	4.333	3.165	3.882	3.888	3.645	3.154	1.974	3.214	1.924	3.150	3.571	3.483
6	BENGKULU	16.212	1.784	1.303	1.598	1.601	1.501	1.298	812	1.323	792	1.297	1.470	1.434
7	SUMATERA SELATAN	88.889	9.780	7.144	8.762	8.776	8.228	7.119	4.455	7.254	4.342	7.110	8.059	7.861
8	BANGKA BELITUNG	16.030	1.764	1.288	1.580	1.583	1.484	1.284	803	1.308	783	1.282	1.453	1.418
9	LAMPUNG	126.719	13.943	10.185	12.490	12.512	11.730	10.148	6.351	10.341	6.190	10.137	11.489	11.206
10	KEP. RIAU	214	24	17	21	21	20	17	11	17	10	17	19	19
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	22.078	2.429	1.774	2.176	2.180	2.044	1.768	1.106	1.802	1.078	1.766	2.002	1.952
13	JAWA BARAT	266.041	29.272	21.382	26.223	26.268	24.626	21.305	13.333	21.710	12.995	21.281	24.120	23.526
14	D.I. YOGYAKARTA	19.196	2.112	1.543	1.892	1.895	1.777	1.537	962	1.566	938	1.536	1.740	1.698
15	JAWA TENGAH	332.741	36.610	26.743	32.797	32.853	30.800	26.647	16.676	27.153	16.253	26.617	30.167	29.425
16	JAWA TIMUR	484.356	53.292	38.929	47.742	47.823	44.834	38.789	24.274	39.525	23.659	38.745	43.913	42.832
17	B A L I	19.442	2.139	1.563	1.916	1.920	1.800	1.557	974	1.586	950	1.555	1.763	1.719
18	KALIMANTAN BARAT	72.598	7.988	5.835	7.156	7.168	6.720	5.814	3.638	5.924	3.546	5.807	6.582	6.420
19	KALIMANTAN TENGAH	26.788	2.947	2.153	2.640	2.645	2.480	2.145	1.342	2.186	1.308	2.143	2.429	2.369
20	KALIMANTAN SELATAN	30.627	3.370	2.462	3.019	3.024	2.835	2.453	1.535	2.499	1.496	2.450	2.777	2.708
21	KALIMANTAN TIMUR	25.553	2.811	2.054	2.519	2.523	2.365	2.046	1.281	2.085	1.248	2.044	2.317	2.260
22	KALIMANTAN UTARA	2.375	261	191	234	234	220	190	119	194	116	190	215	210
23	SULAWESI UTARA	2.446	269	197	241	242	226	196	123	200	119	196	222	216
24	GORONTALO	14.700	1.617	1.181	1.449	1.451	1.361	1.177	737	1.200	718	1.176	1.333	1.300
25	SULAWESI TENGAH	24.809	2.730	1.994	2.445	2.450	2.296	1.987	1.243	2.024	1.212	1.985	2.249	2.194
26	SULAWESI TENGGARA	12.579	1.384	1.011	1.240	1.242	1.164	1.007	630	1.026	614	1.006	1.140	1.112
27	SULAWESI SELATAN	91.208	10.035	7.331	8.990	9.005	8.443	7.304	4.571	7.443	4.455	7.296	8.269	8.066
28	SULAWESI BARAT	15.777	1.736	1.268	1.555	1.558	1.460	1.263	791	1.287	771	1.262	1.430	1.395
29	NUSA TENGGARA BARAT	8.019	882	644	790	792	742	642	402	654	392	641	727	709
30	NUSA TENGGARA TIMUR	13.386	1.473	1.076	1.319	1.322	1.239	1.072	671	1.092	654	1.071	1.214	1.184
31	MALUKU	2.755	303	221	272	272	255	221	138	225	135	220	250	244
32	PAPUA	5.470	602	440	539	540	506	438	274	446	267	438	496	484
33	MALUKU UTARA	261	29	21	26	26	24	21	13	21	13	21	24	23
34	PAPUA BARAT	2.034	224	164	201	201	188	163	102	166	99	163	184	180
JUMLAH PROPINSI		2.018.580	222.098	162.237	198.966	199.305	186.846	161.655	101.163	164.722	98.600	161.471	183.012	178.505

Lampiran 3.21. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	2.368	261	190	233	234	219	190	119	193	116	189	215	209
2	SUMATERA UTARA	6.870	756	552	677	678	636	550	344	561	336	550	623	608
3	SUMATERA BARAT	2.969	327	239	293	293	275	238	149	242	145	238	269	263
4	J A M B I	2.127	234	171	210	210	197	170	107	174	104	170	193	188
5	R I A U	2.393	263	192	236	236	222	192	120	195	117	191	217	212
6	BENGKULU	985	108	79	97	97	91	79	49	80	48	79	89	87
7	SUMATERA SELATAN	5.401	594	434	532	533	500	433	271	441	264	432	490	478
8	BANGKA BELITUNG	974	107	78	96	96	90	78	49	79	48	78	88	86
9	LAMPUNG	7.700	847	619	759	760	713	617	386	628	376	616	698	681
10	KEP. RIAU	13	1,4	1	1,3	1,3	1,2	1	0,7	1,1	0,6	1	1,2	1,1
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1.342	148	108	132	132	124	107	67	109	66	107	122	119
13	JAWA BARAT	16.165	1.779	1.299	1.593	1.596	1.496	1.295	810	1.319	790	1.293	1.466	1.430
14	D.I. YOGYAKARTA	1.166	128	94	115	115	108	93	58	95	57	93	106	103
15	JAWA TENGAH	20.218	2.225	1.625	1.993	1.996	1.871	1.619	1.013	1.650	988	1.617	1.833	1.788
16	JAWA TIMUR	29.431	3.238	2.365	2.901	2.906	2.724	2.357	1.475	2.402	1.438	2.354	2.668	2.603
17	B A L I	1.181	130	95	116	117	109	95	59	96	58	94	107	104
18	KALIMANTAN BARAT	4.411	485	355	435	436	408	353	221	360	215	353	400	390
19	KALIMANTAN TENGAH	1.628	179	131	160	161	151	130	82	133	80	130	148	144
20	KALIMANTAN SELATAN	1.861	205	150	183	184	172	149	93	152	91	149	169	165
21	KALIMANTAN TIMUR	1.553	171	125	153	153	144	124	78	127	76	124	141	137
22	KALIMANTAN UTARA	144	16	12	14	14	13	12	7	12	7	12	13	13
23	SULAWESI UTARA	149	16	12	15	15	14	12	7	12	7	12	13	13
24	GORONTALO	893	98	72	88	88	83	72	45	73	44	71	81	79
25	SULAWESI TENGAH	1.507	166	121	149	149	140	121	76	123	74	121	137	133
26	SULAWESI TENGGARA	764	84	61	75	75	71	61	38	62	37	61	69	68
27	SULAWESI SELATAN	5.542	610	445	546	547	513	444	278	452	271	443	502	490
28	SULAWESI BARAT	959	105	77	94	95	89	77	48	78	47	77	87	85
29	NUSA TENGGARA BARAT	487	54	39	48	48	45	39	24	40	24	39	44	43
30	NUSA TENGGARA TIMUR	813	89	65	80	80	75	65	41	66	40	65	74	72
31	MALUKU	167	18	13	16	17	15	13	8	14	8	13	15	15
32	PAPUA	332	37	27	33	33	31	27	17	27	16	27	30	29
33	MALUKU UTARA	16	1,7	1,3	1,6	1,6	1,5	1,3	1	1,3	1	1,3	1,4	1,4
34	PAPUA BARAT	124	14	10	12	12	11	10	6	10	6	10	11	11
JUMLAH PROPINSI		122.655	13.496	9.859	12.090	12.110	11.353	9.823	6.147	10.009	5.991	9.811	11.120	10.846

Lampiran 3.22. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	7.409	815	595	730	732	686	593	371	605	362	593	672	655
2	SUMATERA UTARA	21.496	2.365	1.728	2.119	2.122	1.990	1.721	1.077	1.754	1.050	1.720	1.949	1.901
3	SUMATERA BARAT	9.290	1.022	747	916	917	860	744	466	758	454	743	842	822
4	J A M B I	6.654	732	535	656	657	616	533	333	543	325	532	603	588
5	R I A U	7.487	824	602	738	739	693	600	375	611	366	599	679	662
6	BENGKULU	3.082	339	248	304	304	285	247	154	252	151	247	279	273
7	SUMATERA SELATAN	16.900	1.859	1.358	1.666	1.669	1.564	1.353	847	1.379	825	1.352	1.532	1.494
8	BANGKA BELITUNG	3.048	335	245	300	301	282	244	153	249	149	244	276	270
9	LAMPUNG	24.092	2.651	1.936	2.375	2.379	2.230	1.929	1.207	1.966	1.177	1.927	2.184	2.130
10	KEP. RIAU	41	4	3	4	4	4	3	2	3	2	3	4	4
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	4.197	462	337	414	414	389	336	210	343	205	336	381	371
13	JAWA BARAT	50.580	5.565	4.065	4.986	4.994	4.682	4.051	2.535	4.127	2.471	4.046	4.586	4.473
14	D.I. YOGYAKARTA	3.650	402	293	360	360	338	292	183	298	178	292	331	323
15	JAWA TENGAH	63.261	6.960	5.084	6.235	6.246	5.856	5.066	3.170	5.162	3.090	5.060	5.735	5.594
16	JAWA TIMUR	92.086	10.132	7.401	9.077	9.092	8.524	7.375	4.615	7.515	4.498	7.366	8.349	8.143
17	B A L I	3.696	407	297	364	365	342	296	185	302	181	296	335	327
18	KALIMANTAN BARAT	13.802	1.519	1.109	1.360	1.363	1.278	1.105	692	1.126	674	1.104	1.251	1.221
19	KALIMANTAN TENGAH	5.093	560	409	502	503	471	408	255	416	249	407	462	450
20	KALIMANTAN SELATAN	5.823	641	468	574	575	539	466	292	475	284	466	528	515
21	KALIMANTAN TIMUR	4.858	535	390	479	480	450	389	243	396	237	389	440	430
22	KALIMANTAN UTARA	452	50	36	45	45	42	36	23	37	22	36	41	40
23	SULAWESI UTARA	465	51	37	46	46	43	37	23	38	23	37	42	41
24	GORONTALO	2.795	308	225	275	276	259	224	140	228	137	224	253	247
25	SULAWESI TENGAH	4.717	519	379	465	466	437	378	236	385	230	377	428	417
26	SULAWESI TENGGARA	2.391	263	192	236	236	221	192	120	195	117	191	217	211
27	SULAWESI SELATAN	17.341	1.908	1.394	1.709	1.712	1.605	1.389	869	1.415	847	1.387	1.572	1.533
28	SULAWESI BARAT	2.999	330	241	296	296	278	240	150	245	147	240	272	265
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.525	168	123	150	151	141	122	76	124	74	122	138	135
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.545	280	205	251	251	236	204	128	208	124	204	231	225
31	MALUKU	524	58	42	52	52	48	42	26	43	26	42	47	46
32	PAPUA	1.040	114	84	103	103	96	83	52	85	51	83	94	92
33	MALUKU UTARA	50	5	4	5	5	5	4	2	4	2	4	5	4
34	PAPUA BARAT	387	43	31	38	38	36	31	19	32	19	31	35	34
	JUMLAH PROPINSI	383.775	42.225	30.845	37.828	37.892	35.523	30.734	19.233	31.317	18.746	30.700	34.794	33.938

Lampiran 3.23. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Subsektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	ACEH	354	39	28	35	35	33	28	18	29	17	28	32	31
2	SUMATERA UTARA	1.028	113	83	101	102	95	82	52	84	50	82	93	91
3	SUMATERA BARAT	444	49	36	44	44	41	36	22	36	22	36	40	39
4	J A M B I	318	35	26	31	31	29	25	16	26	16	25	29	28
5	R I A U	358	39	29	35	35	33	29	18	29	17	29	32	32
6	BENGKULU	147	16	12	15	15	14	12	7	12	7	12	13	13
7	SUMATERA SELATAN	808	89	65	80	80	75	65	41	66	39	65	73	71
8	BANGKA BELITUNG	146	16	12	14	14	13	12	7	12	7	12	13	13
9	LAMPUNG	1.153	127	93	114	114	107	92	58	94	56	92	104	102
10	KEP. RIAU	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	201	22	16	20	20	19	16	10	16	10	16	18	18
13	JAWA BARAT	2.420	266	194	239	239	224	194	121	197	118	194	219	214
14	D.I. YOGYAKARTA	175	19	14	17	17	16	14	9	14	9	14	16	15
15	JAWA TENGAH	3.026	333	243	298	299	280	242	152	247	148	242	274	268
16	JAWA TIMUR	4.405	485	354	434	435	408	353	221	359	215	352	399	390
17	B A L I	177	19	14	17	17	16	14	9	14	9	14	16	16
18	KALIMANTAN BARAT	660	73	53	65	65	61	53	33	54	32	53	60	58
19	KALIMANTAN TENGAH	244	27	20	24	24	23	20	12	20	12	19	22	22
20	KALIMANTAN SELATAN	279	31	22	27	28	26	22	14	23	14	22	25	25
21	KALIMANTAN TIMUR	232	26	19	23	23	22	19	12	19	11	19	21	21
22	KALIMANTAN UTARA	22	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
23	SULAWESI UTARA	22	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
24	GORONTALO	134	15	11	13	13	12	11	7	11	7	11	12	12
25	SULAWESI TENGAH	226	25	18	22	22	21	18	11	18	11	18	20	20
26	SULAWESI TENGGARA	114	13	9	11	11	11	9	6	9	6	9	10	10
27	SULAWESI SELATAN	830	91	67	82	82	77	66	42	68	41	66	75	73
28	SULAWESI BARAT	143	16	12	14	14	13	11	7	12	7	11	13	13
29	NUSA TENGGARA BARAT	73	8	6	7	7	7	6	4	6	4	6	7	6
30	NUSA TENGGARA TIMUR	122	13	10	12	12	11	10	6	10	6	10	11	11
31	MALUKU	25	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
32	PAPUA	50	5	4	5	5	5	4	2	4	2	4	5	4
33	MALUKU UTARA	2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
34	PAPUA BARAT	19	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2
	JUMLAH PROPINSI	18.360	2.020	1.476	1.810	1.813	1.699	1.470	920	1.498	897	1.469	1.665	1.623

Lampiran 3.24. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Subsektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	ACEH	128	14,08	10	13	13	12	10	6	10	6	10	12	11
2	SUMATERA UTARA	371	41	30	37	37	34	30	19	30	18	30	34	33
3	SUMATERA BARAT	160	18	13	16	16	15	13	8	13	8	13	15	14
4	J A M B I	115	13	9	11	11	11	9	6	9	6	9	10	10
5	R I A U	129	14	10	13	13	12	10	6	11	6	10	12	11
6	BENGKULU	53	6	4	5	5	5	4	3	4	3	4	5	5
7	SUMATERA SELATAN	292	32	23	29	29	27	23	15	24	14	23	26	26
8	BANGKA BELITUNG	53	6	4	5	5	5	4	3	4	3	4	5	5
9	LAMPUNG	416	46	33	41	41	39	33	21	34	20	33	38	37
10	KEP. RIAU	1	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,04	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	73	8	6	7	7	7	6	4	6	4	6	7	6
13	JAWA BARAT	874	96	70	86	86	81	70	44	71	43	70	79	77
14	D.I. YOGYAKARTA	63	7	5	6	6	6	5	3	5	3	5	6	6
15	JAWA TENGAH	1.093	120	88	108	108	101	88	55	89	53	87	99	97
16	JAWA TIMUR	1.591	175	128	157	157	147	127	80	130	78	127	144	141
17	B A L I	64	7	5	6	6	6	5	3	5	3	5	6	6
18	KALIMANTAN BARAT	238	26	19	24	24	22	19	12	19	12	19	22	21
19	KALIMANTAN TENGAH	88	10	7	9	9	8	7	4	7	4	7	8	8
20	KALIMANTAN SELATAN	101	11	8	10	10	9	8	5	8	5	8	9	9
21	KALIMANTAN TIMUR	84	9	7	8	8	8	7	4	7	4	7	8	7
22	KALIMANTAN UTARA	8	0,9	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6	0,7	0,7
23	SULAWESI UTARA	8	0,9	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7
24	GORONTALO	48	5	4	5	5	4	4	2	4	2	4	4	4
25	SULAWESI TENGAH	81	9	7	8	8	8	7	4	7	4	7	7	7
26	SULAWESI TENGGARA	41	5	3	4	4	4	3	2	3	2	3	4	4
27	SULAWESI SELATAN	300	33	24	30	30	28	24	15	24	15	24	27	26
28	SULAWESI BARAT	52	6	4	5	5	5	4	3	4	3	4	5	5
29	NUSA TENGGARA BARAT	26	3	2	3	3	2	2	1	2	1	2	2	2
30	NUSA TENGGARA TIMUR	44	5	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4
31	MALUKU	9	1	0,7	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	0,7	0,4	0,7	0,8	0,8
32	PAPUA	18	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
33	MALUKU UTARA	1	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,08	0,08
34	PAPAUA BARAT	7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6
	JUMLAH PROPINSI	6.630	729	533	654	655	614	531	332	541	324	530	601	586

Lampiran 3.25. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	18.010	1.488	1.186	1.940	1.863	1.670	1.426	858	1.498	799	1.721	1.860	1.702
2	SUMATERA UTARA	41.690	3.444	2.745	4.490	4.312	3.866	3.300	1.987	3.468	1.850	3.983	4.305	3.941
3	SUMATERA BARAT	20.120	1.662	1.325	2.167	2.081	1.866	1.593	959	1.674	893	1.922	2.078	1.902
4	J A M B I	7.850	648	517	845	812	728	621	374	653	348	750	811	742
5	R I A U	8.240	681	543	887	852	764	652	393	685	366	787	851	779
6	BENGKULU	6.810	563	448	733	704	632	539	325	566	302	651	703	644
7	SUMATERA SELATAN	23.610	1.950	1.555	2.543	2.442	2.190	1.869	1.125	1.964	1.047	2.255	2.438	2.232
8	BANGKA BELITUNG	5.060	418	333	545	523	469	401	241	421	224	483	522	478
9	LAMPUNG	36.410	3.007	2.398	3.921	3.766	3.377	2.882	1.735	3.029	1.615	3.478	3.760	3.442
10	KEP. RIAU	30	2,5	2	3,2	3,1	2,8	2,4	1,4	2,5	1,3	2,9	3,1	2,8
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	7.010	579	462	755	725	650	555	334	583	311	670	724	663
13	JAWA BARAT	56.750	4.688	3.737	6.112	5.870	5.263	4.493	2.705	4.720	2.518	5.421	5.860	5.364
14	D.I. YOGYAKARTA	12.890	1.065	849	1.388	1.333	1.195	1.020	614	1.072	572	1.231	1.331	1.218
15	JAWA TENGAH	246.050	20.324	16.202	26.498	25.450	22.820	19.478	11.726	20.467	10.916	23.505	25.406	23.259
16	JAWA TIMUR	378.560	31.269	24.927	40.769	39.155	35.109	29.968	18.041	31.489	16.795	36.164	39.089	35.784
17	B A L I	24.040	1.986	1.583	2.589	2.487	2.230	1.903	1.146	2.000	1.067	2.297	2.482	2.272
18	KALIMANTAN BARAT	25.030	2.067	1.648	2.696	2.589	2.321	1.981	1.193	2.082	1.110	2.391	2.584	2.366
19	KALIMANTAN TENGAH	3.790	313	250	408	392	351	300	181	315	168	362	391	358
20	KALIMANTAN SELATAN	7.100	586	468	765	734	658	562	338	591	315	678	733	671
21	KALIMANTAN TIMUR	2.130	176	140	229	220	198	169	102	177	94	203	220	201
22	KALIMANTAN UTARA	500	41	33	54	52	46	40	24	42	22	48	52	47
23	SULAWESI UTARA	2.360	195	155	254	244	219	187	112	196	105	225	244	223
24	GORONTALO	790	65	52	85	82	73	63	38	66	35	75	82	75
25	SULAWESI TENGAH	5.600	463	369	603	579	519	443	267	466	248	535	578	529
26	SULAWESI TENGGARA	7.610	629	501	820	787	706	602	363	633	338	727	786	719
27	SULAWESI SELATAN	29.890	2.469	1.968	3.219	3.092	2.772	2.366	1.424	2.486	1.326	2.855	3.086	2.825
28	SULAWESI BARAT	1.570	130	103	169	162	146	124	75	131	70	150	162	148
29	NUSA TENGGARA BARAT	12.080	998	795	1.301	1.249	1.120	956	576	1.005	536	1.154	1.247	1.142
30	NUSA TENGGARA TIMUR	4.740	392	312	510	490	440	375	226	394	210	453	489	448
31	MALUKU	740	61	49	80	77	69	59	35	62	33	71	76	70
32	PAPUA	2.550	211	168	275	264	236	202	122	212	113	244	263	241
33	MALUKU UTARA	100	8	7	11	10	9	8	5	8	4	10	10	9
34	PAPUA BARAT	290	24	19	31	30	27	23	14	24	13	28	30	27
	JUMLAH PROPINSI	1.000.000	82.600	65.847	107.695	103.432	92.743	79.163	47.658	83.180	44.366	95.531	103.257	94.528

Lampiran 3.26. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	14.718	1.216	969	1.585	1.522	1.365	1.165	701	1.224	653	1.406	1.520	1.391
2	SUMATERA UTARA	34.069	2.814	2.243	3.669	3.524	3.160	2.697	1.624	2.834	1.511	3.255	3.518	3.220
3	SUMATERA BARAT	16.442	1.358	1.083	1.771	1.701	1.525	1.302	784	1.368	729	1.571	1.698	1.554
4	J A M B I	6.415	530	422	691	664	595	508	306	534	285	613	662	606
5	R I A U	6.734	556	443	725	696	625	533	321	560	299	643	695	637
6	BENGKULU	5.565	460	366	599	576	516	441	265	463	247	532	575	526
7	SUMATERA SELATAN	19.294	1.594	1.270	2.078	1.996	1.789	1.527	920	1.605	856	1.843	1.992	1.824
8	BANGKA BELITUNG	4.135	342	272	445	428	383	327	197	344	183	395	427	391
9	LAMPUNG	29.754	2.458	1.959	3.204	3.078	2.760	2.355	1.418	2.475	1.320	2.842	3.072	2.813
10	KEP. RIAU	25	2	2	3	3	2	2	1	2	1	2	3	2
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	5.729	473	377	617	593	531	453	273	477	254	547	592	542
13	JAWA BARAT	46.376	3.831	3.054	4.994	4.797	4.301	3.671	2.210	3.858	2.058	4.430	4.789	4.384
14	D.I. YOGYAKARTA	10.534	870	694	1.134	1.090	977	834	502	876	467	1.006	1.088	996
15	JAWA TENGAH	201.072	16.608	13.240	21.654	20.797	18.648	15.918	9.583	16.725	8.921	19.209	20.762	19.007
16	JAWA TIMUR	309.359	25.553	20.371	33.316	31.998	28.691	24.490	14.743	25.733	13.725	29.553	31.943	29.243
17	B A L I	19.645	1.623	1.294	2.116	2.032	1.822	1.555	936	1.634	872	1.877	2.029	1.857
18	KALIMANTAN BARAT	20.455	1.690	1.347	2.203	2.116	1.897	1.619	975	1.701	907	1.954	2.112	1.934
19	KALIMANTAN TENGAH	3.097	256	204	334	320	287	245	148	258	137	296	320	293
20	KALIMANTAN SELATAN	5.802	479	382	625	600	538	459	277	483	257	554	599	548
21	KALIMANTAN TIMUR	1.741	144	115	187	180	161	138	83	145	77	166	180	165
22	KALIMANTAN UTARA	409	34	27	44	42	38	32	19	34	18	39	42	39
23	SULAWESI UTARA	1.929	159	127	208	199	179	153	92	160	86	184	199	182
24	GORONTALO	646	53	43	70	67	60	51	31	54	29	62	67	61
25	SULAWESI TENGAH	4.576	378	301	493	473	424	362	218	381	203	437	473	433
26	SULAWESI TENGGARA	6.219	514	409	670	643	577	492	296	517	276	594	642	588
27	SULAWESI SELATAN	24.426	2.018	1.608	2.631	2.526	2.265	1.934	1.164	2.032	1.084	2.333	2.522	2.309
28	SULAWESI BARAT	1.283	106	84	138	133	119	102	61	107	57	123	132	121
29	NUSA TENGGARA BARAT	9.872	815	650	1.063	1.021	916	781	470	821	438	943	1.019	933
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3.874	320	255	417	401	359	307	185	322	172	370	400	366
31	MALUKU	605	50	40	65	63	56	48	29	50	27	58	62	57
32	PAPUA	2.084	172	137	224	216	193	165	99	173	92	199	215	197
33	MALUKU UTARA	82	7	5	9	8	8	6	4	7	4	8	8	8
34	PAPUA BARAT	237	20	16	26	25	22	19	11	20	11	23	24	22
	JUMLAH PROPINSI	817.200	67.500	53.811	88.008	84.525	75.790	64.692	38.946	67.975	36.256	78.068	84.381	77.248

Lampiran 3.27. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.592	132	105	171	165	148	126	76	132	71	152	164	150
2	SUMATERA UTARA	3.685	304	243	397	381	342	292	176	307	164	352	381	348
3	SUMATERA BARAT	1.779	147	117	192	184	165	141	85	148	79	170	184	168
4	J A M B I	694	57	46	75	72	64	55	33	58	31	66	72	66
5	R I A U	728	60	48	78	75	68	58	35	61	32	70	75	69
6	BENGKULU	602	50	40	65	62	56	48	29	50	27	58	62	57
7	SUMATERA SELATAN	2.087	172	137	225	216	194	165	99	174	93	199	216	197
8	BANGKA BELITUNG	447	37	29	48	46	41	35	21	37	20	43	46	42
9	LAMPUNG	3.219	266	212	347	333	299	255	153	268	143	307	332	304
10	KEP. RIAU	3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	620	51	41	67	64	57	49	30	52	27	59	64	59
13	JAWA BARAT	5.017	414	330	540	519	465	397	239	417	223	479	518	474
14	D.I. YOGYAKARTA	1.139	94	75	123	118	106	90	54	95	51	109	118	108
15	JAWA TENGAH	21.751	1.797	1.432	2.342	2.250	2.017	1.722	1.037	1.809	965	2.078	2.246	2.056
16	JAWA TIMUR	33.465	2.764	2.204	3.604	3.461	3.104	2.649	1.595	2.784	1.485	3.197	3.455	3.163
17	B A L I	2.125	176	140	229	220	197	168	101	177	94	203	219	201
18	KALIMANTAN BARAT	2.213	183	146	238	229	205	175	105	184	98	211	228	209
19	KALIMANTAN TENGAH	335	28	22	36	35	31	27	16	28	15	32	35	32
20	KALIMANTAN SELATAN	628	52	41	68	65	58	50	30	52	28	60	65	59
21	KALIMANTAN TIMUR	188	16	12	20	19	17	15	9	16	8	18	19	18
22	KALIMANTAN UTARA	44	4	3	5	5	4	3	2	4	2	4	5	4
23	SULAWESI UTARA	209	17	14	22	22	19	17	10	17	9	20	22	20
24	GORONTALO	70	6	5	8	7	6	6	3	6	3	7	7	7
25	SULAWESI TENGAH	495	41	33	53	51	46	39	24	41	22	47	51	47
26	SULAWESI TENGGARA	673	56	44	72	70	62	53	32	56	30	64	69	64
27	SULAWESI SELATAN	2.642	218	174	285	273	245	209	126	220	117	252	273	250
28	SULAWESI BARAT	139	11	9	15	14	13	11	7	12	6	13	14	13
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.068	88	70	115	110	99	85	51	89	47	102	110	101
30	NUSA TENGGARA TIMUR	419	35	28	45	43	39	33	20	35	19	40	43	40
31	MALUKU	65	5	4	7	7	6	5	3	5	3	6	7	6
32	PAPUA	225	19	15	24	23	21	18	11	19	10	22	23	21
33	MALUKU UTARA	9	0,7	0,6	1	0,9	0,8	0,7	0,4	0,7	0,4	0,8	0,9	0,8
34	PAPUA BARAT	26	2	2	3	3	2	2	1,2	2	1,1	2	3	2
	JUMLAH PROPINSI	88.400	7.302	5.821	9.520	9.143	8.199	6.998	4.213	7.353	3.922	8.445	9.128	8.356

Lampiran 3.28. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	1.506	124	99	162	156	140	119	72	125	67	144	155	142
2	SUMATERA UTARA	3.485	288	229	375	360	323	276	166	290	155	333	360	329
3	SUMATERA BARAT	1.682	139	111	181	174	156	133	80	140	75	161	174	159
4	J A M B I	656	54	43	71	68	61	52	31	55	29	63	68	62
5	R I A U	689	57	45	74	71	64	55	33	57	31	66	71	65
6	BENGKULU	569	47	37	61	59	53	45	27	47	25	54	59	54
7	SUMATERA SELATAN	1.974	163	130	213	204	183	156	94	164	88	189	204	187
8	BANGKA BELITUNG	423	35	28	46	44	39	33	20	35	19	40	44	40
9	LAMPUNG	3.044	251	200	328	315	282	241	145	253	135	291	314	288
10	KEP. RIAU	3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	586	48	39	63	61	54	46	28	49	26	56	61	55
13	JAWA BARAT	4.744	392	312	511	491	440	376	226	395	210	453	490	448
14	D.I. YOGYAKARTA	1.078	89	71	116	111	100	85	51	90	48	103	111	102
15	JAWA TENGAH	20.570	1.699	1.354	2.215	2.128	1.908	1.628	980	1.711	913	1.965	2.124	1.944
16	JAWA TIMUR	31.648	2.614	2.084	3.408	3.273	2.935	2.505	1.508	2.632	1.404	3.023	3.268	2.992
17	B A L I	2.010	166	132	216	208	186	159	96	167	89	192	208	190
18	KALIMANTAN BARAT	2.093	173	138	225	216	194	166	100	174	93	200	216	198
19	KALIMANTAN TENGAH	317	26	21	34	33	29	25	15	26	14	30	33	30
20	KALIMANTAN SELATAN	594	49	39	64	61	55	47	28	49	26	57	61	56
21	KALIMANTAN TIMUR	178	15	12	19	18	17	14	8	15	8	17	18	17
22	KALIMANTAN UTARA	42	3	3	5	4	4	3	2	3	2	4	4	4
23	SULAWESI UTARA	197	16	13	21	20	18	16	9	16	9	19	20	19
24	GORONTALO	66	5	4	7	7	6	5	3	5	3	6	7	6
25	SULAWESI TENGAH	468	39	31	50	48	43	37	22	39	21	45	48	44
26	SULAWESI TENGGARA	636	53	42	69	66	59	50	30	53	28	61	66	60
27	SULAWESI SELATAN	2.499	206	165	269	258	232	198	119	208	111	239	258	236
28	SULAWESI BARAT	131	11	9	14	14	12	10	6	11	6	13	14	12
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.010	83	66	109	104	94	80	48	84	45	96	104	95
30	NUSA TENGGARA TIMUR	396	33	26	43	41	37	31	19	33	18	38	41	37
31	MALUKU	62	5	4	7	6	6	5	3	5	3	6	6	6
32	PAPUA	213	18	14	23	22	20	17	10	18	9	20	22	20
33	MALUKU UTARA	8	0,7	0,6	0,9	0,9	0,8	0,7	0,4	0,7	0,4	0,8	0,9	0,8
34	PAPUA BARAT	24	2	2	3	3	2	2	1	2	1	2	3	2
	JUMLAH PROPINSI	83.600	6.906	5.505	9.003	8.647	7.753	6.618	3.984	6.954	3.709	7.986	8.632	7.903

Lampiran 3.29. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	41	3	3	4	4	4	3	2	3	2	4	4	4
2	SUMATERA UTARA	96	8	6	10	10	9	8	5	8	4	9	10	9
3	SUMATERA BARAT	46	4	3	5	5	4	4	2	4	2	4	5	4
4	J A M B I	18	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2
5	R I A U	19	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
6	BENGKULU	16	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1
7	SUMATERA SELATAN	54	4	4	6	6	5	4	3	5	2	5	6	5
8	BANGKA BELITUNG	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	LAMPUNG	84	7	6	9	9	8	7	4	7	4	8	9	8
10	KEP. RIAU	0,1	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,003	0,01	0,003	0,01	0,01	0,01
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	16	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
13	JAWA BARAT	131	11	9	14	14	12	10	6	11	6	12	13	12
14	D.I. YOGYAKARTA	30	2	2	3	3	3	2	1	2	1	3	3	3
15	JAWA TENGAH	566	47	37	61	59	52	45	27	47	25	54	58	53
16	JAWA TIMUR	871	72	57	94	90	81	69	41	72	39	83	90	82
17	B A L I	55	5	4	6	6	5	4	3	5	2	5	6	5
18	KALIMANTAN BARAT	58	5	4	6	6	5	5	3	5	3	5	6	5
19	KALIMANTAN TENGAH	9	0,7	0,6	0,9	0,9	0,8	0,7	0,4	0,7	0,4	0,8	0,9	0,8
20	KALIMANTAN SELATAN	16	1,3	1,1	1,8	1,7	2	1,3	0,8	1,4	0,7	1,6	1,7	2
21	KALIMANTAN TIMUR	5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5
22	KALIMANTAN UTARA	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	SULAWESI UTARA	5	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5	0,6	0,5
24	GORONTALO	2	0,2	0,1	0	0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
25	SULAWESI TENGAH	13	1,1	0,8	1,4	1,3	1,2	1,0	0,6	1,1	0,6	1,2	1,3	1,2
26	SULAWESI TENGGARA	18	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
27	SULAWESI SELATAN	69	6	5	7	7	6	5	3	6	3	7	7	6
28	SULAWESI BARAT	3,6	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
29	NUSA TENGGARA BARAT	28	2	2	3	3	3	2	1	2	1	3	3	3
30	NUSA TENGGARA TIMUR	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1
31	MALUKU	1,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
32	PAPUA	5,9	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6
33	MALUKU UTARA	0,2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
34	PAPUA BARAT	0,7	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1
	JUMLAH PROPINSI	2.300	190	151	248	238	213	182	110	191	102	220	237	218

Lampiran 3.30. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	153	13	10	16	16	14	12	7	13	7	15	16	14
2	SUMATERA UTARA	354	29	23	38	37	33	28	17	29	16	34	37	33
3	SUMATERA BARAT	171	14	11	18	18	16	14	8	14	8	16	18	16
4	J A M B I	67	6	4	7	7	6	5	3	6	3	6	7	6
5	R I A U	70	6	5	8	7	6	6	3	6	3	7	7	7
6	BENGKULU	58	5	4	6	6	5	5	3	5	3	6	6	5
7	SUMATERA SELATAN	201	17	13	22	21	19	16	10	17	9	19	21	19
8	BANGKA BELITUNG	43	4	3	5	4	4	3	2	4	2	4	4	4
9	LAMPUNG	309	26	20	33	32	29	24	15	26	14	30	32	29
10	KEP. RIAU	0,3	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	60	5	4	6	6	6	5	3	5	3	6	6	6
13	JAWA BARAT	482	40	32	52	50	45	38	23	40	21	46	50	46
14	D.I. YOGYAKARTA	110	9	7	12	11	10	9	5	9	5	10	11	10
15	JAWA TENGAH	2.091	173	138	225	216	194	166	100	174	93	200	216	198
16	JAWA TIMUR	3.218	266	212	347	333	298	255	153	268	143	307	332	304
17	B A L I	204	17	13	22	21	19	16	10	17	9	20	21	19
18	KALIMANTAN BARAT	213	18	14	23	22	20	17	10	18	9	20	22	20
19	KALIMANTAN TENGAH	32	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3
20	KALIMANTAN SELATAN	60	5	4	6	6	6	5	3	5	3	6	6	6
21	KALIMANTAN TIMUR	18	1,5	1,2	1,9	1,9	1,7	1	0,9	1,5	0,8	1,7	1,9	1,7
22	KALIMANTAN UTARA	4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
23	SULAWESI UTARA	20	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
24	GORONTALO	7	1	0,4	1	1	1	1	0,3	1	0,3	1	1	1
25	SULAWESI TENGAH	48	4	3	5	5	4	4	2	4	2	5	5	4
26	SULAWESI TENGGARA	65	5	4	7	7	6	5	3	5	3	6	7	6
27	SULAWESI SELATAN	254	21	17	27	26	24	20	12	21	11	24	26	24
28	SULAWESI BARAT	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	NUSA TENGGARA BARAT	103	8	7	11	11	10	8	5	9	5	10	11	10
30	NUSA TENGGARA TIMUR	40	3	3	4	4	4	3	2	3	2	4	4	4
31	MALUKU	6	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6
32	PAPUA	22	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
33	MALUKU UTARA	1	0,07	0,06	0,09	0,09	0,08	0,07	0,04	0,07	0,04	0,08	0,09	0,08
34	PAPUA BARAT	2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
	JUMLAH PROPINSI	8.500	703	560	915	879	788	673	405	707	377	812	878	803

Jenis Pupuk : ZA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	812.385	96.990	63.353	74.552	67.278	64.265	66.110	38.594	76.587	36.310	69.028	76.138	83.180
Hortikultura	49.350	5.892	3.848	4.529	4.087	3.904	4.016	2.344	4.652	2.206	4.193	4.626	5.053
Perkebunan	174.930	20.885	13.642	16.053	14.487	13.838	14.235	8.310	16.491	7.819	14.864	16.395	17.911
Peternakan	11.865	1.416	925	1.089	983	939	966	564	1.119	530	1.008	1.112	1.214
Perikanan Budidaya	1.470	175	115	135	122	116	120	70	139	66	125	137	150
JUMLAH	1.050.000	125.358	81.883	96.358	86.957	83.062	85.447	49.882	98.988	46.931	89.218	98.408	107.508

Jenis Pupuk : NPK

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	2.018.580	222.098	162.237	198.966	199.305	186.846	161.655	101.163	164.722	98.600	161.471	183.012	178.505
Hortikultura	122.655	13.496	9.859	12.090	12.110	11.353	9.823	6.147	10.009	5.991	9.811	11.120	10.846
Perkebunan	383.775	42.225	30.845	37.828	37.892	35.523	30.734	19.233	31.317	18.746	30.700	34.794	33.938
Peternakan	18.360	2.020	1.476	1.810	1.813	1.699	1.470	920	1.498	897	1.469	1.665	1.623
Perikanan Budidaya	6.630	729	533	654	655	614	531	332	541	324	530	601	586
JUMLAH	2.550.000	280.568	204.950	251.348	251.775	236.035	204.213	127.795	208.087	124.558	203.981	231.192	225.498

Jenis Pupuk : ORGANIK

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	817.200	67.500	53.811	88.008	84.525	75.790	64.692	38.946	67.975	36.256	78.068	84.381	77.248
Hortikultura	88.400	7.302	5.821	9.520	9.143	8.199	6.998	4.213	7.353	3.922	8.445	9.128	8.356
Perkebunan	83.600	6.906	5.505	9.003	8.647	7.753	6.618	3.984	6.954	3.709	7.986	8.632	7.902
Peternakan	2.300	190	151	248	238	213	182	110	191	102	220	237	218
Perikanan Budidaya	8.500	703	560	915	879	788	673	405	707	377	812	878	803
JUMLAH	1.000.000	82.601	65.848	107.694	103.432	92.744	79.163	47.658	83.180	44.366	95.531	103.256	94.527

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Jenis Pupuk : ZA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	812.385	96.990	63.353	74.552	67.278	64.265	66.110	38.594	76.587	36.310	69.028	76.138	83.180
Hortikultura	49.350	5.892	3.848	4.529	4.087	3.904	4.016	2.344	4.652	2.206	4.193	4.626	5.053
Perkebunan	174.930	20.885	13.642	16.053	14.487	13.838	14.235	8.310	16.491	7.819	14.864	16.395	17.911
Peternakan	11.865	1.416	925	1.089	983	939	966	564	1.119	530	1.008	1.112	1.214
Perikanan Budidaya	1.470	175	115	135	122	116	120	70	139	66	125	137	150
JUMLAH	1.050.000	125.358	81.883	96.358	86.957	83.062	85.447	49.882	98.988	46.931	89.218	98.408	107.508

Jenis Pupuk : NPK

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	2.018.580	222.098	162.237	198.966	199.305	186.846	161.655	101.163	164.722	98.600	161.471	183.012	178.505
Hortikultura	122.655	13.496	9.859	12.090	12.110	11.353	9.823	6.147	10.009	5.991	9.811	11.120	10.846
Perkebunan	383.775	42.225	30.845	37.828	37.892	35.523	30.734	19.233	31.317	18.746	30.700	34.794	33.938
Peternakan	18.360	2.020	1.476	1.810	1.813	1.699	1.470	920	1.498	897	1.469	1.665	1.623
Perikanan Budidaya	6.630	729	533	654	655	614	531	332	541	324	530	601	586
JUMLAH	2.550.000	280.568	204.950	251.348	251.775	236.035	204.213	127.795	208.087	124.558	203.981	231.192	225.498

Jenis Pupuk : ORGANIK

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	817.200	67.500	53.811	88.008	84.525	75.790	64.692	38.946	67.975	36.256	78.068	84.381	77.248
Hortikultura	88.400	7.302	5.821	9.520	9.143	8.199	6.998	4.213	7.353	3.922	8.445	9.128	8.356
Perkebunan	83.600	6.906	5.505	9.003	8.647	7.753	6.618	3.984	6.954	3.709	7.986	8.632	7.902
Peternakan	2.300	190	151	248	238	213	182	110	191	102	220	237	218
Perikanan Budidaya	8.500	703	560	915	879	788	673	405	707	377	812	878	803
JUMLAH	1.000.000	82.601	65.848	107.694	103.432	92.744	79.163	47.658	83.180	44.366	95.531	103.256	94.527

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN